



VOLUME XIII / NO. 135 / DESEMBER 2018

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

MENATAP MASA DEPAN INDONESIA

Negara berinvestasi dalam jumlah besar guna membangun manusia Indonesia. Perbaikan pada mutu pendidikan dan kesehatan jadi prioritas. Dalam jangka panjang, generasi Indonesia yang berdaya saing bukan lagi impian.



Daftar Isi



- 5 **DARI LAPANGAN BANTENG**
- 6 **EKSPOSUR**
- 10 **LINTAS PERISTIWA**

- LAPORAN UTAMA**
- 15 Mutu Meningkatkan, SDM Kuat
- 18 Infografis
- 20 Berinvestasi Untuk Generasi Nanti
- 23 Pendidikan Vokasi Penunjang Industri
- 25 APBN 2019: Pembangunan Manusia Jadi Prioritas

- WAWANCARA**
- 27 Haji Sehat Haji Selamat

- POTRET KANTOR**
- 30 Inklusi Keuangan Untuk Kesejahteraan

- FIGUR**
- 32 Melayani Sepenuh Hati

- EKONOMI TERKINI**
- 36 Pertumbuhan Ekonomi Masih Tertahan Global

- KOLOM EKONOM**
- 40 Anggaran dan Kesejahteraan Rakyat

- GENERASI EMAS**
- 44 Kampung Pendidikan, Kampung Masa Depan

- OPINI**
- 46 Pengadaan Barang/Jasa dengan Manfaat Sepandan

- REGULASI**
- 48 Aturan Perpajakan Pertambangan Mineral, Penerimaan Negara Akan Meningkatkan

- INSPIRASI**
- 50 Dedikasi Tinggi Sang Anak Petani

- RENUNGAN**
- 52 Menjemput Hoki

- BUKU**
- 53 Lean In: Sentilan dalam Memperjuangkan Kesetaraan

- JALAN-JALAN**
- 54 Jakarta Aquarium: Melaut di Daratan

- SELEBRITI**
- 56 Nitia Anisa: Tips Membaca Ala Nitia

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Muchamad Ardani, Indratmo Kurniawan, Diah Sarkorini. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Maria Cecilia Kinanti, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin, Aditya Arifiyanto, Intan Nur S., Ardes Martua Yudito S., Emawan Setyo P., Azharuddin Priyotomo. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Rhoric Andra F., Muhammad Fath Kathin, Adhi Kurniawan, Nur Iman, Agus Tri Hananto, Langgeng Wahyu Pamungkas, Arief Taufiq Nugroho, Arief Kuswanadji. **Desain Grafis dan Layout:** Arifindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

APBN 2019: Untuk Kemakmuran yang Berkeadilan

Dalam pidatonya di depan Sidang Pleno Pertemuan IMF World Bank bulan Oktober 2018, Presiden menyatakan bahwa Winter is Coming, sebuah analogi dari sebuah film seri yang menggambarkan di tengah adanya ancaman global berupa perubahan iklim yang harus dihadapi dunia, sementara itu beberapa negara tetap menjalankan perang dagang dan peningkatan suhu geopolitik antar negara.

APBN 2019 dirancang untuk dapat menjadi jaket penghangat apabila musim dingin itu tiba.

Dia menjadi katalisator ketika musim dingin tiba, sehingga apabila menghadapi musim dingin masyarakat Indonesia tetap dapat bertahan dengan suasana perekonomian yang stabil dan menyehatkan.

Hal tersebut diwujudkan dengan adanya alokasi dana untuk bencana alam pada APBN 2019, sehingga apabila terjadi bencana alam pada dengan ukuran dan skala yang sudah ditetapkan, akan langsung mendapatkan tambahan anggaran. Selain itu juga akan dikembangkan skema transfer risiko bencana, dengan melanjutkan asuransi

pertanian dan asuransi nelayan, serta melakukan piloting untuk asuransi barang milik negara.

Untuk memperkuat fondasi bangsa menuju kemakmuran, dalam APBN 2019, pemerintah juga memperhatikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan strategi mengedepankan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini dijalankan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan percaya diri di dunia internasional.

Berbagai terobosan kebijakan akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, seperti penilaian kinerja, peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

Untuk satuan Biaya Operasional Sekolah, mulai tahun 2019 akan memperhitungkan tidak hanya jumlah peserta didik, namun juga kesulitan geografis dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Di bidang kesehatan, pemerintah melakukan perbaikan pembangunan bidang kesehatan, antara lain dengan

melakukan peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan, penguatan program promotif dan preventif dengan mendorong pola hidup sehat.

Untuk menjaga stabilitas kesehatan nasional, dilakukan perluasan Penerimaan Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional yang akan diberikan kepada 96,8 juta jiwa. Di bidang infrastruktur kesehatan, akan dilakukan pembangunan rumah sakit di daerah yang dibiayai melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dari berbagai bauran kebijakan pada APBN 2019, pemerintah yakin bahwa Indonesia akan mampu bertahan di musim dingin yang menerpa. Dia tidak hanya menjadi penghangat, tapi juga sekaligus menjadi bantalan apabila terjadi guncangan yang kuat.

Di sinilah peran penting pemerintah untuk melindungi segenap rakyatnya dan membawa kepada kemakmuran yang berkeadilan.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi



Benua besar. Peluang besar.

Manfaatkan fasilitas ekspor ke Afrika dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hingga tahun 2021



Pembiayaan



Penjaminan



Asuransi

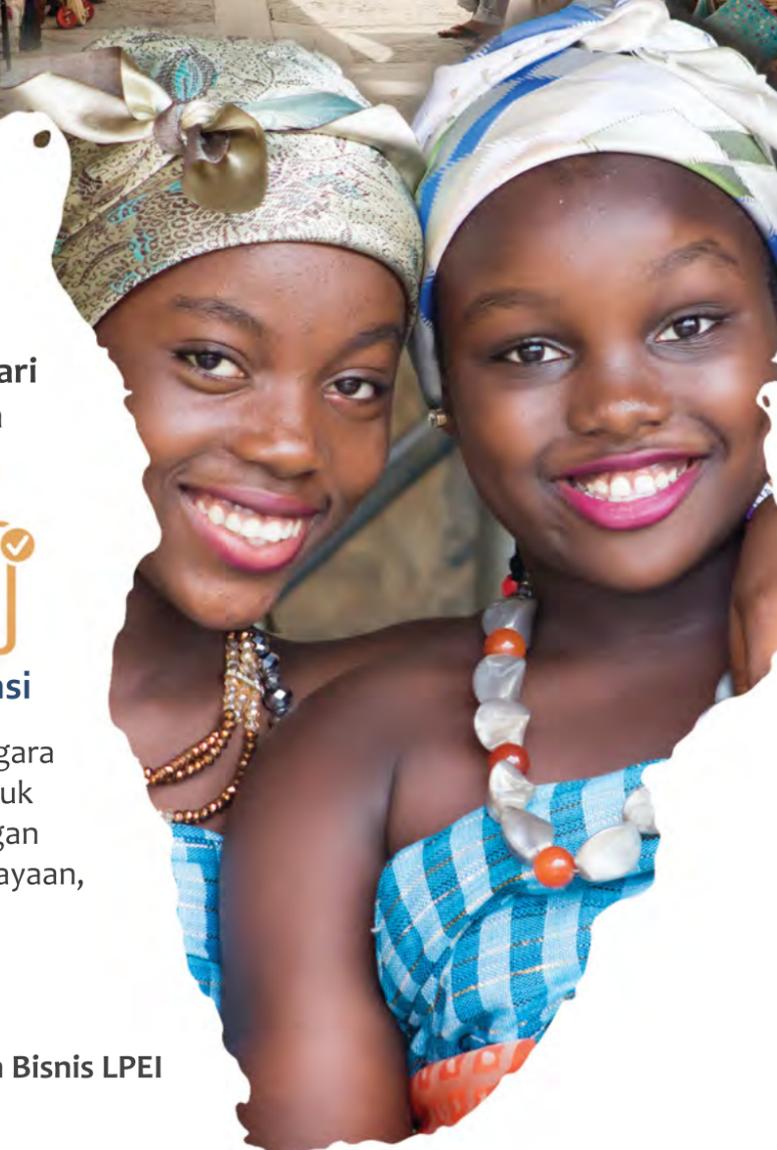
Pemerintah mendorong ekspor ke negara-negara di Benua Afrika dengan menugaskan LPEI untuk memberikan fasilitas ekspor kepada perorangan dan badan usaha dalam negeri berupa pembiayaan, penjaminan, dan asuransi dengan *rate yang kompetitif*.

Informasi lebih lanjut:

Divisi Penugasan Khusus dan Pengembangan Bisnis LPEI

1. Nanda Hasrian - 081388011655

2. Nilla Meiditha - 087885841323



Kementerian Keuangan Republik Indonesia @kemenkeuRI

Langkah apa saja yg perlu Pemerintah ambil agar SDM Indonesia semakin berkualitas dan berdaya-saing tinggi.

@septnptr (Septiana Putri)

Perbaiki sistem pendidikan yg tdk "menyiksa" pelajar, dgn memprioritaskan proses drpd hasil yg didukung oleh lingkungan & tenaga pengajar yg inovatif. Tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tapi juga meningkatkan pemahaman dan keringanan pelayanan psikologis untuk kesehatan mental bagi masyarakat

@ristyaputri7 (ristyaputri_17)

pengembangan kualitas SDM secara komprehensif meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan ilmu dan teknologi juga meningkatkan kualitas di dunia pendidikan. Kecerdasan IQ, EQ dan SQ harus seimbang.

@KyunghyeD (Nia Hikari Chan)

1. Realising and rewarding hard work (tidak harus berupa uang)
2. Offer opportunities for learning (tidak membatasi para pekerja untuk mengerjakan pekerjaan yang itu-itu saja)
3. Take a positive and transparent approach to communication



Lumpur Sidoarjo Dinilai Kembali

Dua Penilai KPKNL Sidoarjo sedang melakukan survey lapangan untuk revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di lokasi semburan lumpur di Porong, Sidoarjo. BMN yang dulu berupa tanah milik satuan kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, kini diambil alih Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS).

Foto
Andi Al Hakim

Saksi Museum Tsunami

Museum Tsunami Aceh merupakan bangunan bersejarah untuk mengenang tragedi tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Bangunan rancangan Ridwan Kamil ini mengambil ide rumah tradisional Aceh yang dibuat menyerupai rumah panggung. Museum ini dirancang agar wisatawan merasakan kejadian pada detik-detik tsunami datang. Di salah satu ruangan terdapat tempat yang dinamakan Sumur Doa, disana pengunjung dapat melihat nama-nama para korban tsunami.

Foto
Arif
Kuswanadji



14/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Kemenkeu Berikan Santunan Pegawai Korban Musibah JT610

Pesawat Lion Air JT610 dengan rute penerbangan Bandara Soekarno-Hatta menuju Pangkal Pinang mengalami kecelakaan pada Senin (29/10) setelah lepas landas pukul 06.20 WIB. Pesawat jenis Boeing 737 Max 8 itu sempat mengudara selama 13 menit sebelum jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Sebanyak 21 dari 189 penumpang pesawat adalah pegawai Kemenkeu yang berkantor di Pangkal Pinang. Dari 21 korban, 12 korban merupakan pegawai dari DJP, 6 korban dari DJPB, dan 3 korban dari DJKN. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan duka yang mendalam untuk jajaran Kemenkeu yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-160 serta berharap para keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. "Mereka semuanya bangun dini hari untuk menuju ke tempat tugas, berbakti pada negeri. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan terbaik dan ampunan dan balasan berlipat atas seluruh amalan yang telah diberikan dan pengabdian mereka kepada NKRI. Dan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan dan ketabahan kesabaran. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan berhenti di dunia ini. Kita semua selalu berikhtiar memberikan yang terbaik. Saya sangat bangga dengan dedikasi mereka semua dan saya berterimakasih mereka semua telah menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk menjalankan tugas," ungkap Menkeu.

Kemenkeu memberikan penjelasan mengenai santunan keluarga pegawai Kemenkeu yang menjadi korban atas jatuhnya pesawat Lion Air JT610 pada konferensi pers update penanganan musibah Lion Air JT610 di ruang press Kemenkeu, Rabu (14/11). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Hadiyanto memberikan penjelasan mengenai santunan yang akan didapatkan keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 tujuan Pangkal Pinang. Ia memaparkan tujuh santunan yang akan diperoleh keluarga. Tujuh santunan tersebut adalah (1) santunan kematian kerja sebesar 60 persen dari 80 kali gaji terakhir dibayar sekaligus, (2) uang duka tewas sebanyak 6 kali gaji terakhir, (3) biaya pemakaman, (4) gaji terusan sebanyak 6 kali gaji terakhir, (5) pensiun janda/duda/anak 72 persen dari gaji terakhir. (6) Jika korban hanya meninggalkan orang tua, maka akan mendapatkan pensiun orang tua sebesar 20 persen dari gaji terakhir, dan (7) bantuan beasiswa untuk anak dengan rincian belum sekolah dan SD sebesar 45 juta, SMP sebesar 35 juta, SMA sebesar 25 juta, dan Pendidikan Tinggi sebesar 15 juta, adapun syarat perolehan beasiswa adalah anak belum memasuki usia sekolah, masih sekolah, kuliah, berusia 25 tahun, belum pernah menikah dan belum bekerja.

25/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Pasca Pertemuan IMF-WBG 2018, Pemerintah Hibahkan Laptop dan Printer

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan hibah berupa 500 unit laptop dan 300 unit printer kepada Pemerintah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Banyuwangi. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Keuangan (Menkeu) kepada Gubernur Bali, Bupati Banyuwangi, dan perwakilan Provinsi NTB di aula Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Bali pada Kamis (25/10). Hal ini sesuai dengan amanat Presiden RI agar penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. "Ini adalah komitmen dari panitia nasional bahwa barang-barang yang sudah tidak terpakai namun masih sangat terjaga kondisinya dapat kita hibahkan bagi masyarakat. Spesifikasi dari komputer dan printer ini termasuk tinggi dan kita berharap di pemerintah daerah dapat menggunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang bisa muncul dengan kreativitas dan inovasi," ujar Menkeu.



31/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Infrastruktur Menjadi peranan Pemerintah menuju Indonesia Emas 2045

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Seminar Hari Oeang ke-72 bertema "Dialog Lintas Generasi: Melanjutkan Estafet Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045" di Gedung Dhanapala, Jakarta, pada Rabu (31/10). Seminar ini menghadirkan pandangan dari pembicara Dorodjatun Kuntjoro Jakti (Ekonom), William Tanuwijaya (CEO Tokopedia), dan Iman Usman (CO Founder & CPO Ruang guru). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peranan Pemerintah untuk melanjutkan estafet pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 adalah sebagai penghubung masyarakat untuk akses ekonomi terutama infrastruktur seperti pembuatan jalan di Pulau Jawa dan luar Jawa, akses internet dan teknologi seperti proyek Palapa Ring. "Kita butuh banyak sekali infrastruktur untuk meng-connect potensi, ide, solusi dengan delivery-nya. APBN kita gunakan namun tidak semuanya pakai APBN, sebagian kita pakai Public Private Partnership. Jadi, kita investing in infrastructure," jelas Menkeu.

01/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Satu Dasawarsa Sukuk Negara untuk Kemaslahatan Bangsa

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyelenggarakan "Satu Dasawarsa Sukuk Negara untuk Kemaslahatan Bangsa" di Gedung Dhanapala, Jakarta pada Kamis (01/11) untuk menyampaikan perkembangan Sukuk Negara selama sepuluh tahun terakhir. Menteri Keuangan (Menkeu) menjelaskan pemerintah mulai menerbitkan Sukuk Negara sejak tahun 2008 untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan APBN sekaligus mengembangkan pasar keuangan syariah. "Kalau kita lihat dari sisi Islamic Finance Country Index, Indonesia itu ada urutan keenam kita masih di bawah Malaysia, Iran, Saudi, United Arab Emirates. Jadi kita sekarang nomor ke 6. Kalau dilihat dari sisi hal ini berarti kalau dengan mata optimis kita mengatakan kita punya potensi yang sangat besar," kata Menkeu.



Kemenkeu Kembali Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memperoleh peringkat pertama pada acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018. Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan langsung penghargaan tersebut kepada Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, pada Senin (05/11) di Istana Wakil Presiden. Berbeda dengan tahun lalu, peringkat pertama pada tahun 2018 ini diperoleh pada kategori dengan kualifikasi terbaik yaitu kualifikasi Informatif. Hanya ada dua Kementerian pada Kategori Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Informatif ini, yaitu Kemenkeu dengan nilai 96,90 dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai 94,88. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana dalam laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik 2018. "Pada kategori Badan Publik Kementerian Kualifikasi Informatif, Satu, Kementerian Keuangan dengan nilai 96,90," ucap Gede.



05/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

09/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Apresiasi Capaian Inovasi DJPB dalam Mengelola Keuangan Negara

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keynote speech pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II 2018 bertema "Akselerasi Menuju Pengelola Perbendaharaan Negara Berkelas Dunia" di Gedung Dhanapala, Jakarta pada Jum'at (09/11). Menkeu mengapresiasi capaian inovasi DJPB dalam memberikan terobosan untuk mengelola keuangan negara. "Saya senang bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan berinovasi dan pembangunan berbagai macam teknologi aplikasi itu terus dilakukan. Hari ini saya melihat kemajuan lagi bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mendapatkan ISO 9001:2015," ucapnya. Namun demikian, Menkeu menginginkan DJPB terus berinovasi guna meningkatkan kapasitas di dalam mengelola keuangan negara. "Itu adalah keinginan kita untuk membuat seluruh pengelolaan keuangan negara terus-menerus mengalami perbaikan dan bisa dibandingkan secara internasional," pungkaskan Menkeu.

12/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



LPDP Luncurkan Beasiswa Khusus Santri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir pada acara peluncuran beasiswa LPDP khusus Santri di Kementerian Agama, Jakarta, pada Senin, (12/11). Beasiswa yang dikhususkan untuk para santri tersebut memberikan kesempatan bagi para santri untuk melanjutkan pendidikan Master (S2) dan Doktoral (S3) di dalam dan luar negeri. Beasiswa tersebut akan diberikan bagi 100 santri yang lolos seleksi. Untuk menjadi negara besar, Indonesia memerlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah memberikan beasiswa bagi para kandidat berpotensi untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik di dunia. "Indonesia dengan 267 juta manusia, mayoritas adalah anak-anak generasi muda dan sebagian cukup besar sekolahnya di pesantren. Santri itu sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia," tegas Menkeu.



15/11

Teks
Tim PFM-MDTF

Foto
Tim PFM-MDTF

Lelang Menjadi Mudah dengan Lelang.go.id

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) meluncurkan peresmian Domain Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id) di gedung Dhanapala pada Kamis, (15/11). Peresmian lelang.go.id merupakan salah satu strategi untuk mengenalkan dan mempermudah masyarakat untuk mengikuti lelang dan membuat lelang lebih informatif dan mudah diakses. "Selama ini, kalau kita mendengar lelang, apalagi lelang yang dilakukan di suatu Kementerian kadang masih banyak yang memandang bahwa lelang itu berbelit-belit. Oleh karena itu, terobosan yang perlu ditampilkan apresiasi yang sangat luar biasa dengan cara online. Dengan online ini berarti tadi image itu akan hilang dengan sendirinya," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo dalam acara peresmian tersebut. Sebagai informasi, peresmian domain ini merupakan salah satu rangkaian Pekan Kekayaan Negara dalam rangka memperingati HUT DJKN ke 12.

21/11

Teks
Biro KLI

Foto
DJP

Sosialisasi UU PNB

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memaparkan beberapa penyempurnaan pokok pada UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara lain pengelompokan objek pajak dalam enam klaster, pengaturan tarif PNBP, tata kelola, pengawasan, dan hak wajib bayar. Pada acara Sosialisasi UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP itu Wamenkeu menjelaskan bahwa perubahan terhadap UU PNBP ini sudah lama dipersiapkan dengan cakupan yang cukup luas. "Kalau PNBP meningkat maka kita akan punya ruang fiskal yang cukup kuat," terang Wamenkeu di aula Djuanda, Rabu (21/11). Selain itu, tujuan pengaturan PNBP agar dapat menghimpun dan optimalisasi sumber penerimaan negara mengingat kontribusinya sebesar 25.4% ke penerimaan negara, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta menyederhanakan atau mengurangi jenis dan tarif PNBP, khususnya terkait layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab untuk tetap menyediakan layanan dasar.



MUTU MENINGKAT, SDM KUAT

Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas manusia Indonesia sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Amanat Undang-Undang terkait porsi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN pun, konsisten dipenuhi. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Sebab perbaikan mutu manusia merupakan investasi jangka panjang dan berkelanjutan untuk kemakmuran negara di masa mendatang.

Kualitas manusia Indonesia

Baru-baru ini, Bank Dunia merilis Human Capital Index (HCI) atau Indeks Modal Manusia pada pertemuan tahunan World Bank-IMF di Bali. HCI didesain guna menjelaskan bagaimana perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan dalam mendukung produktivitas generasi yang akan datang. Pengukuran HCI menggunakan beberapa indikator, meliputi probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (*survival*), kuantitas dan kualitas pendidikan maupun kesehatan, hingga *stunting*.

Dari skala 0-1, Indonesia memperoleh skor 0,53. Hal

ini menempatkan Indonesia di posisi 87 dari 157 negara yang diukur. Kinerja Indonesia masih lebih baik dibandingkan rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah yang mencapai skor 0,48. Namun, berada di bawah rata-rata negara di Asia Timur dan Pasifik dengan skor 0,62.

Lebih jauh, skor 0,53 mencerminkan bahwa seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini, ketika ia tumbuh, maka produktivitasnya hanya mencapai 53 persen dari potensi yang bisa dicapai dibandingkan apabila ia memiliki pendidikan yang lengkap dan kesehatan yang baik. Selanjutnya, rilis tersebut juga menjelaskan, bahwa meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan besar selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi masih terdapat defisit modal manusia. Hal ini terjadi akibat akumulasi dari kurangnya investasi pada SDM Indonesia selama beberapa dekade terakhir.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2017 mencapai 70,81, atau meningkat dibandingkan 2014 sebesar 68,90. Hal ini membawa Indonesia berada di posisi ke-116 dari 189 negara di dunia. Selanjutnya, berdasarkan Global Competitive Index (GCI) 4.0, daya saing Indonesia menempati peringkat ke-36 dari 137 negara yang diukur, membaik dibandingkan tahun sebelumnya di posisi ke-41.

Lebih jauh, diketahui meski Indonesia unggul dalam aspek *market size* dengan menempati posisi ke-9 di dunia, tapi masih rendah dalam hal inovasi, adaptasi teknologi, dan efisiensi pasar kerja yang berkaitan erat dengan pencapaian bidang pendidikan. Begitupun pada bidang keahlian, kesehatan, dan inovasi, Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan negara lain.

Pembangunan manusia jadi prioritas

Pemerintah menyadari betul kondisi sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini. Perekonomian yang semakin meningkat perlu diimbangi dengan peningkatan

Kualitas pendidikan menentukan produktivitas generasi di masa mendatang

Foto
M. Fath
Kathin



Perbaikan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama terus dilakukan.

Foto Resha Aditya

pada kualitas SDM. Pembangunan fisik melalui infrastruktur yang selama ini telah dilakukan pemerintah adalah bagian dari upaya membangun manusia Indonesia agar terbuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri.

Selain pembangunan fisik, pembangunan nonfisik juga dilakukan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Hal ini terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Terkait hal ini, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi menyampaikan pendidikan dan kesehatan memegang peran penting dalam meningkatkan daya saing suatu negara.

“Pertama, pembangunan kesehatan akan meningkatkan usia harapan hidup suatu bangsa, sehingga masyarakat akan mempunyai rentang waktu yang lebih lama dalam bekerja dan status kesehatan yang optimal dalam menunjang dan meningkatkan produktivitasnya. Kedua, pembangunan pendidikan dapat memperkuat kemampuan masyarakat untuk bersaing dengan negara lainnya melalui peningkatan kompetensi dan inovasi,” jelasnya.

Subandi melanjutkan, investasi

pemerintah pada pendidikan dan kesehatan masyarakat sejak dini diyakini bisa memaksimalkan potensi bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia ke depan. “Masyarakat yang sehat dapat memaksimalkan produktivitas dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara investasi pada pendidikan dapat mempersiapkan SDM berkualitas agar lebih berdaya saing,” ungkapnya.

Untuk itu, pembangunan SDM Indonesia menjadi prioritas dalam APBN 2019. Kebijakan fiskal melalui APBN diarahkan untuk meningkatkan investasi dan daya saing melalui pembangunan manusia. Hal ini terutama dilakukan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri.

Terkait hal ini, Direktur Jenderal Anggaran, Askolani menyampaikan, anggaran pendidikan dalam APBN 2019 mencapai Rp492,5 triliun atau tumbuh hingga 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran ini dialokasikan melalui tiga pos, yaitu belanja pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD), serta pembiayaan. Sementara itu, anggaran kesehatan mencapai Rp123,1 triliun atau tumbuh sebesar 14,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran ini dialokasikan pada dua pos, yaitu belanja pusat dan belanja transfer ke daerah.

Memperbaiki mutu pendidikan

Pada pos belanja pusat, alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp163,1 triliun. “Pemerintah pertama, melanjutkan dan memantapkan kebijakan yang telah ada, dari mulai PAUD (pendidikan anak usia dini), sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga atas. Kedua, program-proram pendukungnya seperti beasiswa, terus ditingkatkan, baik yang ada di level sekolah maupun universitas. Ketiga, yang menjadi tambahan Presiden dan Menteri Keuangan adalah pembangunan (rehabilitasi) sekolah yang bersifat *on top*,” ungkap Askolani.

Selama ini, perbaikan gedung dan sarana prasarana sekolah dilakukan melalui Kemendikbud, Kemeristekdikti, Kemenag, dan Pemda. Maka pada 2019, pemerintah mempercepat proses rehabilitasi tempat pendidikan dengan menganggarkan dana sebesar Rp6,6 triliun untuk pembangunan sekolah dan universitas yang akan

dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Kementerian PUPR akan ditugaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres). “Sehingga harapannya, pembangunan sekolah bisa lebih masif dan cepat. Jika kebijakan ini konsisten dipertahankan hingga 2020-2021, bukan tidak mungkin semua sekolah di Indonesia bisa lebih baik (kondisinya),” katanya.

Selain percepatan pembangunan sarana dan prasarana sekolah, beberapa perbaikan yang dilakukan dalam bidang pendidikan meliputi efektivitas penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan kinerja dan afirmasi, keberlanjutan Program Indonesia Pintar (PIP) yang lebih tepat sasaran, perluasan program beasiswa bidik misi, serta enforcement atas pemenuhan anggaran pendidikan oleh pemda.

Hal yang berbeda dalam anggaran pendidikan tahun depan adalah terkait pembiayaan. Pada 2019, pembiayaan untuk dana pendidikan dianggarkan sebesar Rp21 triliun dengan dua peruntukkan. “Satu, untuk menambah dana abadi pendidikan di LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dalam bentuk *sovereign wealth fund* sebesar Rp20 triliun. Kedua, ada sekitar Rp1 triliun untuk dana abadi pengembangan untuk penelitian,” jelasnya.

Menurut Askolani, saat ini LPDP memiliki dana abadi sekitar Rp30 triliun. Penambahan anggaran sebesar Rp20 triliun akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi, baik program magister maupun doktoral, melalui beasiswa.

Kenaikan signifikan pada anggaran pendidikan juga terkait alokasi pada revitalisasi pendidikan vokasi. Pada 2019, anggaran vokasi mencapai 17,2 triliun. “Jumlah ini meningkat jauh bila dibandingkan tahun lalu yang hanya di bawah Rp10 triliun,” ungkap Askolani. Pendidikan vokasi akan diperkuat oleh pemerintah guna meningkatkan kualifikasi SDM melalui dukungan dalam hal biaya pelatihan, pemenuhan perangkat memadai seperti laboratorium, serta kualitas tenaga pendidik.

Meningkatkan mutu kesehatan

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi menyampaikan dalam bidang kesehatan, pemerintah menargetkan dua hal utama. “Pertama meningkatkan status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat. Kedua, menurunkan prevalensi penyakit menular dan risiko

penyakit tidak menular,” ungkapnya.

Subandi mengakui masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan pemerintah dalam bidang kesehatan. Misalnya dalam hal angka kematian ibu dan anak, meski mengalami penurunan keduanya dinilai masih cukup tinggi. Pada 2015, angka kematian ibu mencapai 305 kematian dari 100 ribu kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi mencapai 24 dari 1000 kelahiran hidup pada 2017.

Hal yang juga menjadi isu global adalah terkait dengan prevalensi *stunting*. Indonesia memiliki prevalensi *stunting* yang cukup tinggi. Pada anak di bawah dua tahun, prevalensi *stunting* mencapai 29,9 persen pada 2018, sedangkan pada anak di bawah lima tahun jumlahnya 30,8 persen pada 2017. Melalui APBN 2019, pemerintah menargetkan prevalensi *stunting* bisa diturunkan menjadi 24,8 persen. Dirjen Anggaran, Askolani menyebutkan pemerintah berupaya mempercepat penanganan *stunting* melalui intervensi gizi di 160 kabupaten/kota pada 2019.

Tantangan lain di bidang kesehatan adalah prevalensi penyakit menular, meliputi HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria. “Sampai tahun 2018, prevalensi penyakit HIV tidak menunjukkan penurunan, masih di angka 0,33 persen. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah kasus tuberkulosis ketiga tertinggi di dunia. Selain itu, kasus malaria juga masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama di wilayah bagian timur Indonesia,” ungkap Subandi.

Untuk faktor risiko penyakit tidak menular seperti merokok, kegemukan, dan tekanan darah tinggi, Subandi mengakui masih terus meningkat jumlahnya. “Hal ini

akan berdampak pada peningkatan kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, seperti stroke, jantung, dan kanker yang pada akhirnya menurunkan produktivitas masyarakat.

Menghadapi hal tersebut, Subandi menyampaikan pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan finansial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang terus meningkat hingga 203,3 juta penduduk atau 76,7 persen penduduk pada September 2018. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92,2 juta penduduk adalah peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Terkait hal ini, Dirjen Anggaran Askolani menyampaikan, dalam APBN 2019, jangkauan PBI kesehatan untuk JKN akan diperluas. Ditargetkan pada 2019 sebanyak 96,8 juta jiwa akan menerima bantuan kesehatan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 92 juta penduduk.

Selain itu, beberapa perbaikan di bidang kesehatan pada 2019 juga meliputi perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, serta optimalisasi bauran kebijakan untuk keberlangsungan program JKN. APBN 2019 juga menargetkan prevalensi tuberkulosis turun dari sebelumnya sebanyak 263 orang per 100 ribu penduduk menjadi 245 orang per 100 ribu penduduk. Sementara jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria ditargetkan meningkat menjadi 300 kabupaten/kota dari sebelumnya sebanyak 232 kabupaten kota.

Teks Farida Rosadi

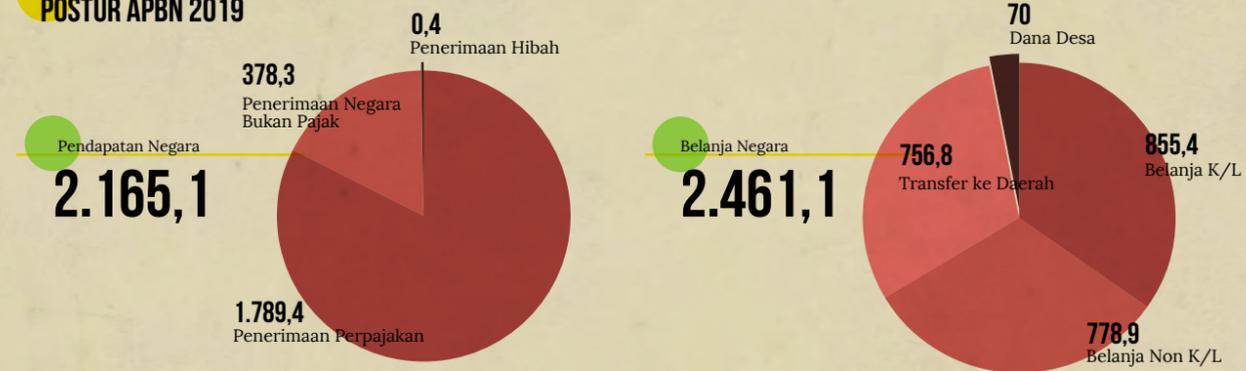
MENGUPAYAKAN APBN 2019, MENINGKATKAN SDM

APBN 2019 telah disahkan DPR pada akhir bulan Oktober 2018 yang lalu. Kini, pemerintah telah mempersiapkan langkah lanjutan untuk mengoptimalkan APBN 2019 sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui pengembangan program pendidikan dan kesehatannya.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO



POSTUR APBN 2019



Keseimbangan Primer	(20,1) triliun rupiah
Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)	(296,0) triliun rupiah
Pembiayaan Anggaran	296,0 triliun rupiah
Pembiayaan Utang	359,3 triliun rupiah
Pembiayaan Investasi	(75,9) triliun rupiah
Pemberian Pinjaman	(2,4) triliun rupiah
Kewajiban Penjaminan	0,0 triliun rupiah
Pembiayaan Lainnya	15,0 triliun rupiah

ANGGARAN PENDIDIKAN

Anggaran pendidikan akan tetap dijaga pada kisaran 20% dari APBN dan diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas SDM dengan memperbaiki:

- Peningkatan efektivitas pemanfaatan BOS
- Melanjutkan Program Indonesia Pintar diikuti peningkatan ketepatan sasaran.
- Mempercepat pembangunan sarpras sekolah dasar dan universitas.
- Memperluas program beasis afirmasi/bidik misi.
- Mengalokasikan dana abadi penelitian.
- Melaksanakan penegakan pemenuhan anggaran pendidikan oleh Pemda.
- Memperkuat pendidikan vokasi untuk meningkatkan link and match dengan industri.

Peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN



Anggaran pendidikan disebar, baik melalui belanja pusat yang dikoordinir oleh Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, dan Kemen PUPR maupun melalui belanja transfer ke daerah dan pembiayaan.

ANGGARAN KESEHATAN

Sementara itu, anggaran Kesehatan juga tetap dijaga pada kisaran 5% dari APBN dengan mengarahkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting. Pada program kesehatan ini, pemerintah memperbaiki:

- Perluasan penerima Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (2019: 96,8 juta jiwa) yang diikuti dengan peningkatan ketepatan sasaran.
- Perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama
- Percepatan penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 160 Kabupaten kota.
- Melanjutkan optimalisasi bauran kebijakan untuk keberlangsungan program JKN

Peningkatan anggaran kesehatan dalam APBN



Anggaran kesehatan akan dialokasikan di Kemenkes, BPOM, BKKBN, JKN PNS/TNI/POLRI, maupun di dalam belanja transfer ke daerah.

BERINVESTASI UNTUK GENERASI NANTI



Pemerintah meningkatkan kualitas SDM melalui aspek kesehatan

Foto
Rezky
Ramadhani

Tahun 2019 menjadi tahun yang krusial. Tak hanya karena faktor pemilihan umum legislatif dan eksekutif, tahun 2019 juga menjadi tahun APBN yang memprioritaskan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fokus utama. Namun demikian, hal itu bukan berarti sektor lain tak

mendapat alokasi anggaran yang meningkat. Sebut saja belanja infrastruktur yang nilainya tetap meningkat dari Rp410 triliun pada 2018 menjadi Rp415 triliun dalam APBN 2019.

Rencana Kerja Pemerintah sendiri mengambil tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema tersebut diarahkan pada upaya pembangunan SDM dan upaya pemerataan pembangunan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Oleh karena itu, belanja APBN 2019 akan lebih difokuskan pada investasi di bidang pendidikan dan kesehatan guna menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.

Sebagai bukti, tren anggaran pendidikan pun mengalami kenaikan untuk APBN 2019 dari Rp444,1 triliun pada 2018 menjadi Rp492,5 triliun pada APBN 2019. Atau dengan kata lain, total anggaran pendidikan naik sebesar Rp48,4 triliun pada 2019. Begitu pun untuk sektor kesehatan. Alokasi anggaran untuk tahun 2019 naik sebesar Rp12,1 triliun menjadi Rp123,1 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Alokasi anggaran pun tidak hanya di Kementerian/Lembaga pusat, namun juga dialokasikan ke Pemerintah Daerah melalui dana transfer ke daerah.

“Itu yang kemudian menjadi tulang punggung daripada alokasi belanja kita. Satu Belanja Pendidikan, kedua Infrastruktur, kemudian Belanja Kesehatan, yang satu lagi yang juga dominan itu Perlindungan Sosial, yang jumlahnya juga signifikan baik melalui PKH (Program Keluarga Harapan) maupun subsidi,” jelasnya kepada Media Keuangan dalam wawancara beberapa waktu lalu.

Seperlima APBN untuk pendidikan

Lebih jauh, Askolani juga menjelaskan pada tahun ini alokasi yang diberikan untuk pendidikan sebesar Rp492,5 triliun dari total APBN yang sebesar Rp2.461,1 triliun, sehingga total alokasi Belanja Pendidikan terhitung sebesar 20 persen dari APBN. Senada dengan hal tersebut, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

(PMK), Purwanto, mengungkapkan anggaran pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang diamankan dalam UUD 1945.

Sejak tahun 2009, besaran anggaran pendidikan telah dialokasikan sebesar seperlima dari APBN. Alokasi kesehatan sendiri sudah mencapai 5 persen dari APBN sejak tahun 2016. “Jumlah tersebut terus meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya volume APBN kita,” jelas Purwanto.

Secara anggaran pun, pemerintah memberikan perhatian penuh untuk pendidikan. Hal itu terbukti selama 5 tahun terakhir alokasi Belanja Pendidikan memiliki tren yang semakin naik. Menurut Purwanto, kenaikan yang semakin besar dalam anggaran pendidikan tahun depan memang ditujukan untuk beberapa program seperti *refocusing* anggaran pendidikan untuk peningkatan kualitas dan akses yang merata dan berkeadilan; meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah; meningkatkan kualitas dan ketersediaan guru; sinergi antarprogram di bidang pendidikan untuk *sustainable education*, seperti Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, Bidikmisi, beasiswa LPDP; memperkuat pendidikan vokasi antara lain sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*); memperkuat sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan; mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi; dan terakhir untuk memperkuat peran LPDP sebagai Sovereign

Wealth Fund untuk mendorong perluasan program beasiswa afirmasi.

Lebih detail, Purwanto pun menjelaskan melalui Program Indonesia Pintar yang menysasar anak didik dari kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu untuk membantu anak-anak usia sekolah agar tetap mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah sampai tamat, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal. Selain itu, juga ada Bidikmisi yang diperuntukkan bagi mereka yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

“Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas guru, Pemerintah juga menyediakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) baik bagi guru dengan status PNS maupun Non-PNS dengan persyaratan tertentu,” ujarnya.

Terkait infrastruktur pendidikan, Pemerintah Pusat dan Daerah terus berusaha menyediakan tempat belajar yang layak bagi siswa melalui pembangunan Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Ruang Kelas, Sarana Pendidikan Lain, Revitalisasi/Renovasi Sekolah Berasrama, Ruang Penunjang, dan Sekolah Satu Atap, serta penyediaan peralatan pendidikan yang memadai.

Manusia sehat berkualitas

Pada hakikatnya, alokasi anggaran pendidikan dan



"Kalau di Belanja Kesehatan itu ada PBI (Penerima Bantuan Iuran). Itu kan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah memberikan bantuan iuran untuk masyarakat kurang mampu. Nah itu jumlahnya juga dinaikkan,"

Hidayat Amir
Kepala Pusat Kebijakan APBN

kesehatan sudah sedemikian besarnya, sehingga yang harus menjadi perhatian adalah kualitas penggunaan anggarannya sendiri. Menurut Purwanto, masih banyak hal yang perlu diperbaiki seperti masih banyaknya sekolah yang rusak dan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Namun demikian, hal yang perlu ditekankan adalah anggaran pemerintah hingga saat ini masih terbatas dan perlu pengalokasian yang sesuai dengan kebutuhan program-program pemerintah.

Tak hanya itu, selain ingin meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pemerintah juga fokus untuk meningkatkan kesehatan dari manusianya. Purwanto menyoroti pentingnya aspek kesehatan dalam program pembangunan SDM. Untuk itu, anggaran kesehatan diarahkan untuk percepatan peningkatan

kepesertaan JKN; peningkatan akses dan kualitas layanan program JKN; mendorong *supply side* melalui sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah; mendorong pola hidup sehat melalui Germas (Gerakan Masyarakat Sehat); peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita, serta imunisasi; percepatan penurunan stunting melalui skema Program for Result (PforR); serta pemerataan akses layanan kesehatan melalui DAK Fisik dan pembangunan rumah sakit di daerah menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Senada dengan Purwanto, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Hidayat Amir, mengungkapkan kondisi masyarakat Indonesia yang menuju bonus demografi menunjukkan semakin banyaknya angkatan usia produktif. Untuk itu, permasalahan kesehatan SDM seperti *stunting* menjadi masalah serius karena dapat berdampak pada tingkat kecerdasan dan pertumbuhan fisik yang rentan terhadap rendahnya daya tahan tubuh. Ujungnya, tingkat produktivitas yang seharusnya bisa dicapai pun menurun.

"Kalau di Belanja Kesehatan itu ada PBI (Penerima Bantuan Iuran). Itu kan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah memberikan bantuan iuran untuk masyarakat kurang mampu. Nah itu jumlahnya juga dinaikkan," ungkapnya.

Menyongsong 2019

Amir menjelaskan lebih jauh terkait tantangan APBN yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dalam menghadapi tahun 2019. Menurutnya, tantangan terbesar masih berasal dari ketidakpastian yang masih tinggi dari situasi global. "Kemarin misalnya dalam World Bank-IMF *Annual Meetings* ada *release world economic outlook*. Itu hampir semua negara pertumbuhannya terkoreksi di tahun depan," terangnya.

Dari sisi domestik, meski memasuki tahun politik, namun hemat Amir berdasarkan pengalaman tahun politik sebelum-sebelumnya relatif masih aman. Untuk itu, ia berharap kondisi yang stabil dan aman di dalam negeri dapat mendorong sektor perdagangan melalui sisi ekspornya. Harapannya, ekspor akan bisa menjadi mesin pendorong untuk pertumbuhan ekonomi.

"Saya berharap situasi pemilu tetap kondusif. *Campaign*-nya *campaign* sehat gitu. Karena sekali lagi, perekonomian tidak akan tumbuh baik kalau dalam kondisi yang tidak stabil. Itu kira-kira dari sisi resiko-

resikonya," harapnya.

Sementara itu, dari sisi konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi yang besar sekitar 56 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga daya beli atau dengan kata lain menjaga inflasi. Amir mengungkapkan dengan berhasilnya proyek infrastruktur, inflasi yang berasal dari *volatile food* sudah mulai terkendali dan stabil. Hal itu dikarenakan dengan adanya infrastruktur proses distribusi logistik saat ini menjadi lebih mudah dan baik.

Menambahkan hal tersebut, Direktur Anggaran Bidang PMK, Purwanto, mengungkapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam APBN 2019. Misalnya melalui pemantapan reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara, melanjutkan efisiensi belanja nonprioritas untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif, mendorong efektivitas program perlindungan sosial, penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, penguatan IT dan vokasional, mendorong penguatan investasi dan ekspor antara lain melalui percepatan dan perbaikan kualitas infrastruktur, serta antisipasi ketidakpastian dan penanganan isu-isu strategis

Teks Abdul Aziz



Praktek kerja siswa vokasi

Foto
Tino Adi P

PENDIDIKAN VOKASI PENUNJANG INDUSTRI

Perubahan dunia yang sangat cepat perlu diantisipasi dengan menguatkan sumber daya manusia. Selain melalui kesehatan, juga melalui pendidikan. Selama 30 tahun terakhir, dunia pendidikan Indonesia belum mengalami perubahan mendasar. Sebab itu, untuk dapat mengikuti revolusi industri 4.0, perbaikan dunia pendidikan menjadi krusial.

APBN 2019: Pembangunan Manusia Jadi Prioritas

Dirjen Anggaran, Askolani mengatakan, mulai 2019 pemerintah akan fokus merevitalisasi pendidikan vokasi. Selain untuk meningkatkan kualifikasi SDM dalam dunia kerja, pendidikan ini juga dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan industri yang menjadi motor penggerak ekonomi. Sayangnya, data BPS menunjukkan masyarakat berpendidikan SMK menyumbang angka pengangguran tertinggi sebesar 11,2 persen per Agustus 2018.

Ketua Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia, Sigit Pranowo mengatakan, selama ini penghargaan terhadap lulusan vokasi masih rendah, baik yang dari SMK maupun Diploma. Umumnya, pada setiap penerimaan pegawai yang dicari selalu sarjana. Apalagi pada pendaftaran PNS peluang untuk lulusan vokasi masih langka.

“Apakah untuk pekerjaan administrasi harus sarjana? Bahkan saat ini petugas keamanan pun ada yang sarjana. Karena semua pekerjaan harus sarjana, akhirnya bermunculan penyelenggara pendidikan sarjana abal-abal. Lalu untuk apa membuat pendidikan vokasi jika tidak ada kesempatan untuk ikut mendaftar bekerja?” kata Sigit.

Keterlibatan Dunia Usaha

Menurut Sigit, agar dapat mendukung pembangunan, penyelenggara pendidikan vokasi perlu diberi fleksibilitas untuk menetapkan pilihan program studi. Buka tutup program studi juga perlu disesuaikan kebutuhan. Dengan begitu, industri tidak perlu menyelenggarakan sekolah kejuruan atau perguruan tinggi sendiri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya seperti yang saat ini dilakukan banyak perusahaan.

“Hal ini terjadi karena tidak ada komunikasi harmonis antara penyedia dan pengguna tenaga kerja,” kata Sigit. Sejak tahun 90-an pemerintah telah mencanangkan *link and match* antara pendidikan vokasi dan industri. Namun, penyusunan kurikulumnya masih berjalan sendiri-sendiri. Penyelenggara pendidikan merasa mampu melihat

kebutuhan industri. Sementara, industri merasa lulusan pendidikan vokasi belum siap kerja.

Sebab itu, keterlibatan industri menjadi mutlak agar lulusan vokasi memenuhi standar kebutuhan. Misalnya, melalui kegiatan praktik dengan melibatkan instruktur dari industri. Disamping itu, jika guru dan dosen diberi kesempatan mengikuti kegiatan serta penelitian terapan di industri, produktivitas industri juga akan meningkat.

Indonesia tidak hanya membangun industri manufaktur, tetapi juga industri jasa, keuangan, kesehatan, dan lainnya. Dengan demikian, revitalisasi perlu melibatkan semua sektor. Sebab itu, kata Sigit, penyelenggaraan magang bersertifikat selama 6 bulan yang dilakukan Kementerian BUMN merupakan terobosan yang patut didukung.

“Contoh yang sudah lama berlangsung adalah peserta magang diperlakukan sebagai magang *te-ko* alias pembuat minuman teh dan kopi. Padahal manfaat dari keduanya dapat diperoleh bila program magang sudah dirancang bersama,” ujar Sigit.

Kompetensi Tenaga Pendidik

Sigit mengingatkan, revitalisasi tenaga pendidik juga harus diprioritaskan. Menurutnya, tenaga pendidik vokasi saat ini umumnya adalah lulusan sarjana dan magister pendidikan akademik,

bukan pendidikan vokasi atau magister terapan. Kondisi ini berpengaruh pada cara mengajar dan mengevaluasi kompetensi siswa. “Bahkan asesor akreditasi pendidikan vokasi yang berlatar belakang akademik seringkali tidak nyambung,” katanya.

Pendidikan vokasional lebih mengutamakan praktik daripada teori. Karenanya, para pengajar harus memiliki pengalaman profesional. Jadi, seharusnya pembinaan kompetensi dosen vokasi tidak di jalur akademik. Jika dosen terlibat dalam kegiatan industri, pengalaman terapannya akan bertambah dan terbaharui, baik terkait metode kerja maupun peralatan dan teknologi industri termutakhir.

Alokasi anggaran untuk pendidikan vokasi di 2019 mencapai Rp17,2 triliun, jauh lebih tinggi dibanding tahun 2018 sebesar Rp10,1 triliun. Dana tersebut tersebar di Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pariwisata.

Anggaran ini akan digunakan untuk melatih 235 ribu tenaga kerja, revitalisasi 12 Politeknik, peningkatan kompetensi 6771 instruktur, serta pengadaan diklat di 26 lembaga. Selain itu, dana ini juga ditujukan untuk pelatihan sertifikasi, penyiapan 1400 ruang praktek di SMK, serta bantuan operasional peralatan pendidikan.

Teks Irma Kesuma



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 akan banyak difokuskan ke sektor pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan di sektor pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal investasi dan meningkatkan daya saing. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai fokus dan arah kebijakan APBN 2019 dalam pembangunan SDM Indonesia, simak wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Anggaran, Askolani berikut ini.

Tema kebijakan fiskal 2019 dalam penyusunan APBN adalah mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM. Seperti apa filosofi dan latar belakangnya?

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Ketersediaan SDM melimpah dan teknologi semakin canggih, tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung oleh adanya SDM yang berkualitas. Peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan SDM-nya, dan hanya akan dapat dicapai melalui pembangunan bidang pendidikan

Askolani,
Direktur Jenderal
Anggaran

Foto
Resha Aditya
Pratama

dan kesehatan.

Kalau kita lihat, pijakannya sudah dibuat oleh Presiden Jokowi sejak 2015, dengan menambah signifikan belanja produktif untuk infrastruktur, baik itu melalui Kementerian/Lembaga maupun daerah maupun skema pembiayaan di situ. Kemudian, setelah berjalan, Presiden melihat bahwa pendidikan menjadi salah satu modal ke depan yang lebih bersifat nonfisik, yaitu melalui investasi di bidang pendidikan dan SDM. Nah, Menteri Keuangan (Menkeu) kemudian mengusung dan menggerakkan tema fiskal kita sejalan dengan arahan Presiden menjadi APBN 2019 untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM. Sehingga, sangat berhubungan dengan yang sudah dilakukan, juga dengan visi misi Presiden yang disiapkan satu tahun ini untuk manusia kita ke depan.

Dalam APBN 2019, penganggaran pada pembangunan SDM difokuskan pada pendidikan dan kesehatan. Sejauh mana pengembangan SDM ini bisa mempengaruhi daya saing?

Kalau kita lihat itu penting ya, contohnya, SDM itu yang nyata yang kita bisa lihat adalah pimpinan kita di (Kementerian) Keuangan yang melakukan pengembangan SDM yang konsisten semenjak 20 tahun yang lalu melalui pendidikan dan beasiswa. Hasilnya, sudah kita bisa lihat beberapa waktu yang lalu dan saat ini. Pimpinan-pimpinan di (Kementerian) Keuangan ini adalah hasil dari pada investasi SDM yang dilakukan oleh pimpinan keuangan 20-30 tahun yang lalu.

Mereka mendapatkan penggodokan pendidikan yang lebih tinggi ke S2, S3 kemudian apa mereka mendapatkan ilmu SDM yang lebih luas dan kemudian akhirnya mereka menjadi pimpinan-pimpinan saat ini, baik di level menengah maupun di level atas. Dan kalau kita lihat SDM di Kemenkeu ini termasuk salah satu yang terbaik kalau kita bandingkan dengan kelas Kementerian.

Kalau manusia Indonesia sekarang sudah bisa diarahkan dari mulai PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), SD (Sekolah Dasar), tingkat pertama sampai sampai universitas. Di universitas pun kemudian juga kemungkinan bisa mendapatkan beasiswa di universitas terbaik di dunia, dengan program LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) contohnya. Sehingga membuka peluang untuk semua lapisan masyarakat. Tentunya dampaknya butuh waktu, bisa 5, 10 tahun, bisa 20 tahun ke depan. Hal itu akan mempunyai (bekal) profesionalisme dan kompetensi yang tinggi dimanapun dia bertugas, di swasta maupun BUMN.

Seberapa besar peningkatan anggaran di bidang pendidikan? Apa bentuk perbaikan yang dilakukan?

Anggaran pendidikan mengalami kenaikan dari Rp435 triliun di 2018 menjadi sekitar Rp492,5 triliun di 2019. Dan dari hasil penetapan APBN 2019 mudah-mudahan akan naik ke 12 persen. Dana pendidikan ini tentunya dialokasikan paling tidak dari tiga jenis alokasi. Satu melalui Belanja Pemerintah Pusat, Kementerian/

Lembaga, kedua melalui transfer ke daerah di tiap Pemda (Pemerintah Daerah), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan ketiga melalui pembiayaan.

Satu hal lagi yang ditambahkan oleh Presiden dan Menteri Keuangan adalah ada pembangunan sekolah yang sifatnya *on top*, dari yang dilakukan saat ini oleh Dikbud, Ristekdikti, Agama, maupun Pemda dalam membangun sekolah. Sebab kita lihat sampai saat ini *kan* masih banyak sekolah-sekolah yang belum layak. Hasil dari keputusan Presiden yang sesuai usulan dari Menteri Keuangan, ada dana Rp6,6 triliun (untuk) pembangunan sekolah, universitas, yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Lalu peningkatan anggaran di bidang kesehatan seperti apa? Bagaimana bentuk perbaikan yang dilakukan?

Untuk kesehatan, anggarannya di 2019 diputuskan menjadi sekitar Rp123,1 triliun rupiah. Dan ini dibandingkan di 2018 yang *outlook* nya mencapai 107,4 mengalami kenaikan 14,6 persen. Dana kesehatan ini dialokasikan di dua pos, satu Belanja Pemerintah Pusat, kedua Transfer ke Daerah, tapi dia tidak ada di Pembiayaan.

Yang baru adalah, selain kita memperkuat kebijakan yang sudah ada, di 2019 itu akan ditambah jangkauannya PBI (Penerima Bantuan Iuran) kesehatan untuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dari sekitar 92 juta di tahun 2018 menjadi 96,8 juta jiwa yang akan mendapatkan bantuan kesehatan. Kemudian tentunya perbaikan pelayanan prioritas kesehatan juga pertama, kemudian percepatan penanganan *stunting* melalui intervensi gizi di 160 Kabupaten/Kota targetnya di 2019. Kalau yang di 2018 ini targetnya itu 100 Kabupaten/Kota.

Untuk yang *stunting* akan masih akan di langsung dimonitor oleh pusat. Kita tahu level *stunting* kita sekarang ini sekitar 28-30 persen. Nah dengan kebijakan yang konsisten yang sudah dimulai sejak 2018 untuk penanganan *stunting* ini, harapannya ini akan turun menuju ke 20. Nah ini penting, kenapa *stunting* ini harus diperangi. Sebab ini, *stunting* ini adalah menyebabkan bayi kurang gizi, fisiknya lebih kecil dan tadi kemampuan otaknya juga mungkin tidak maksimal. Dan ini menentukan kualitas manusia SDM juga.

Teks Dianita Sulastuti

Wawancara



Haji Sehat Haji Selamat

Menunaikan ibadah haji adalah impian hampir semua muslim. Bisa beribadah langsung di rumah-Nya (Baitullah) memberi kebahagiaan yang tak tertandingi. Agar perjalanan haji dapat dilakukan dengan nyaman dan aman, ada syarat yang perlu diperhatikan, termasuk kesehatan. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Eka Jusup Singka mengungkapkan pentingnya mental dan fisik yang prima bagi keselamatan para jamaah.

Jamaah sedang menunaikan ibadah di tanah suci

Foto Ilustrasi
Frantau Baskara



Kedua dari kanan, Eka Jusup bersama rombongan haji

Foto Dok. Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes

Apa saja kriteria calon jamaah haji yang bisa diberangkatkan?

Syarat utamanya adalah calon jamaah tersebut kita estimasikan mampu berhaji dengan selamat. Artinya, dia akan bisa menjalankan ibadahnya tanpa sakit. Sebab itu, ada calon jamaah yang tidak bisa diberangkatkan atau ditunda keberangkatannya karena beberapa penyakit.

Pertama, penyakit yang mengancam jiwa. Misalnya, gagal jantung stadium IV, gagal ginjal stadium IV, penyakit paru atau TB kronis. Kedua, gangguan jiwa berat seperti skizofrenia dan demensia. Kalau dia sama dirinya sendiri saja lupa, bagaimana dia mau mengingat hotel tempatnya menginap nanti?

Terakhir, penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Misalnya kanker dan *totally drugs resistance* TB. Artinya, yang bersangkutan sudah resisten terhadap obat apapun. Nah, ketiganya tidak memenuhi syarat istihah haji atau mampu secara fisik, mental, dan perbekalan.

Tetapi, ada juga yang sudah memenuhi persyaratan kemudian tidak layak terbang karena tiba-tiba terkena campak. Jamaah seperti ini juga harus ditunda keberangkatannya. Kita sayang

kepada para jamaah maupun lingkungan sekitarnya. Kita tidak mau satu pesawat nanti tertular.

Bagaimana jika calon jamaah difabel?

Untuk difabel, harus lihat lagi disabilitasnya seperti apa. Untuk dapat diberangkatkan, semua calon jamaah haji harus memenuhi unsur istihah atau kemampuan tadi. Sementara disabilitas artinya kan ada ketidakmampuan.

Kalau ketidakmampuannya berat, seperti *down syndrome*, jelas tidak memenuhi syarat. Tetapi, kalau disabilitasnya adalah keterbatasan fisik, misalnya cacat karena pernah kecelakaan, maka masih bisa diberangkatkan. Syaratnya, ada yang mendampingi dan tidak dengan penyakit-penyakit penyerta.

Seperti apa proses pemeriksaan kesehatan calon jamaah?

Pemeriksaan pertama dilakukan saat calon jamaah membayar dana haji. Jadi pemeriksaan ini bisa jadi dilakukan 3-4 tahun sebelumnya. Kalau ternyata harus menunggu 10 tahun, maka 10 tahun kemudian akan diperiksa kembali.

Selama 10 tahun tersebut, penyelenggara haji akan melakukan pembinaan. Diantaranya, pembinaan kebugaran serta penyuluhan kesehatan. Biasanya, pihak Puskesmas akan melakukan kunjungan rumah kepada calon jamaah haji yang akan berangkat.

Dalam penyuluhan kesehatan haji, pesan apa yang ditekankan kepada calon jamaah?

Calon jamaah haji harus sadar akan kemampuan dirinya. Harus berbesar hati jika ternyata dia tidak memenuhi persyaratan. Ibadah haji itu ibadah fisik. Jamaah harus hidup bersih, sehat, dan makan makanan bergizi.

Di tanah suci banyak sekali faktor yang menyebabkan orang sakit. Misalnya saat cuaca panas, kalau kita tidak pakai payung dan semprotan air, kita bisa kena *heat stroke*. Jadi pencegahan itu lebih utama. Tapi yang paling penting jamaah harus sadar diri kalau tidak mampu. Jangan memaksakan diri saat kelelahan. Buat apa?

Kasus kesehatan apa yang paling sering ditemui?

Jadi penyakit ada dua. Ada yang sifatnya internal. Misalnya yang paling sering ditemui adalah diabetes melitus, jantung, hipertensi, dan paru. Ada juga penyakit yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya, sengatan panas, asma, flu onta, dan kekambuhan peradangan paru. Untuk penyakit yang disebabkan oleh faktor eksternal, bisa kita cegah dengan alat pelindung. Sebab itu, kami selaku petugas langsung turun ke lapangan untuk menjaga para jamaah.

Seberapa penting vaksinasi bagi para calon jamaah?

Arab Saudi mewajibkan vaksin meningitis untuk semua calon jamaah. Penyakit ini sangat berbahaya. Mereka yang terkena meningitis bisa meninggal hanya dalam waktu 2-3 hari saja. Selain itu, ada vaksin lain yang sifatnya dianjurkan, yakni vaksin influenza dan radang paru.

Tujuan pemberian vaksin adalah untuk perlindungan sesama jamaah dan rakyat Saudi. Alhamdulillah, hingga saat ini belum ada virus yang dibawa keluar atau masuk oleh jamaah kita dari dan ke Saudi.

Kesulitan apa yang paling sering dihadapi selama penyuluhan?

Sebenarnya jamaah kita tidak ada masalah, asalkan seluruh elemen penyelenggara haji benar-benar menjaga mereka. Mulai dari ulama, Kementerian Kesehatan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, hingga tokoh masyarakat harus sepakat bahwa jamaah harus dilindungi. Artinya, jamaah harus diberi pemahaman bahwa kesehatan adalah syarat mutlak.

Saat ini ada tren program 7 kali atau 10 kali umroh misalnya. Saya tidak melarang orang beribadah, tetapi harus mengindahkan kondisinya. Tidak boleh memaksakan calon jamaah terus menerus melakukan kegiatan fisik sementara dia sudah tua dan sakit. Orang yang memiliki keterbatasan ini justru harus kita lindungi.

Apa prioritas perbaikan haji ke depan, khususnya di bidang kesehatan?

Semua pihak harus berkomitmen mendukung terwujudnya kesehatan haji. Mulai tahun ini, Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat edaran. Substansinya adalah bagi jamaah yang tidak memenuhi syarat *istihah* maka tidak perlu melakukan pelunasan biaya haji. Uang mereka akan dikembalikan.

Seringkali ada pihak yang mengatakan bahwa calon jamaah ingin meninggal di tanah suci. Saya menolak pernyataan itu karena itu tidak benar. Bisa dikatakan semua jamaah yang saya temui ingin kembali ke rumahnya, ke tanah air.

Haji adalah ibadah eksklusif, hanya bagi yang mampu. Jamaah harus meyakini, syarat wajib haji itu ada lima. Islam, dewasa, berakal, merdeka, dan *istihah* atau punya kemampuan. Tetapi masih banyak yang bingung. Apa sih definisi mampu itu? Mampu itu bukan hanya ekonomi, tetapi juga kesehatan fisik dan mental.

Tahun-tahun kemarin ada orang yang sedang dirawat di rumah sakit, ketika ada panggilan untuk masuk asrama haji, dia datang dengan diantar *ambulance* dengan kondisi masih mengenakan selang infus. Dia mau saja karena dia tidak tahu. Makanya, jamaah harus kita cerdaskan. Bagaimana caranya? Cukup dengan mengedukasi syarat wajib haji saja sebenarnya.

Bagaimana jika ada yang merasa dihambat atau diperlakukan tidak adil?

Sekali lagi, haji memang eksklusif. Hanya bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu maka tidak ada kewajiban baginya.

Kalau tidak ada kewajiban maka tidak ada dosa baginya jika tidak melaksanakan haji. Sebenarnya, dia bahkan bisa menghajikan orang lain dengan pahala yang sama.

Lalu ada pertanyaan, kalau haji eksklusif berarti Allah tidak adil *dong*? Bukan tidak adil. Justru Allah maha pengasih dan penyayang. Saya tidak bisa bayangkan jika haji tidak eksklusif. Orang bisa melakukan apa saja termasuk merampok untuk bisa membiayai perjalanan haji. *Kan* agama tidak mengajarkan begitu.

Begitu pula dalam hal kesehatan. Ibadah haji punya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kita cinta rakyat kita. Jika benar-benar cinta, artinya kita harus melindungi, termasuk melalui dakwah yang benar mengenai kesehatan.

Dari sisi petugas kesehatan sendiri, seperti apa persiapannya?

Untuk petugas medis, hal yang kami kuatkan adalah mental melayani. Jargon kami adalah "Tugasku adalah ibadahku". Jargon ini menjadi nilai-nilai kehidupan kami. Selain itu, kami langsung turun melihat jamaah haji ke lapangan. Cuma Indonesia yang punya tim gerak cepat di sana, negara lain tidak.

Tim ini sifatnya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Kami terus memberikan penyuluhan, mulai dari di bandara hingga ke hotel-hotel. Jamaah haji perlu diingatkan terus untuk mengenakan masker, minum obat, dan lain sebagainya.

Selain itu, kami juga menyediakan tim di rumah sakit dan klinik yang kita punya. Kami memberikan segalanya di semua lini. Ibarat kata, sudah siap untuk menghadapi serangan darat, laut, udara.

Sebenarnya, jumlah petugas di klinik kita belum memadai, hanya 300 orang. Padahal jumlah jamaah kita tahun ini mencapai 221 ribu orang. Tetapi kami tetap akan terus berusaha memaksimalkan layanannya.

Teks Irma Kesuma

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan – BKF

Inklusi Keuangan Untuk Kesejahteraan

Gedung Badan Kebijakan Fiskal

Foto
Anas Nur Huda

Jika diibaratkan organ tubuh, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan otak dari Kementerian Keuangan. Unit eselon I ini berisi ekonom ulung, para pemikir dan penggodok kebijakan fiskal yang penting untuk negara kita. Salah satu unit eselon II di BKF adalah Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

Penguatan kebijakan sektor keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PKSK telah memetakan organisasinya ke dalam 6 bidang yaitu Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan, Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah, Bidang Kebijakan Keuangan Inklusif, Bidang Pemantauan Sistem Keuangan, dan Bidang Dukungan Kesekretariatan Stabilitas Sistem Keuangan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sementara itu, untuk komposisi pegawai PKSK, jumlah pegawai PKSK adalah sebanyak 49 orang, di mana 33 pegawai atau 67 persen merupakan laki-laki dan 16 pegawai atau 33 persen merupakan perempuan. Lebih dari setengah jajaran di PKSK merupakan tenaga profesional lulusan program pascasarjana dari dalam dan luar negeri.

Menurut Ayu Sukorini, Kepala PKSK, tantangan unit yang ia pimpin dalam menjalankan tugas dan fungsinya datang dari kedinamisan perkembangan sektor keuangan. Koordinasi dengan banyak pemangku kepentingan juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam perumusan rekomendasi kebijakan dan peraturan dan perundang-undangan. "Tantangan tersebut

kami atasi dengan komunikasi yang intensif, sehingga kami bisa menghasilkan output yang komprehensif dan agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai pengaturan yang dilakukan," terang satu-satunya perempuan dalam jajaran eselon II di BKF ini. Ayu juga menambahkan bahwa PKSK juga secara berkala menyelenggarakan kegiatan *knowledge sharing* dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dari instansi terkait, seperti BI dan OJK, maupun asosiasi. Kegiatan seperti ini dimaksudkan agar PKSK memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dan terkini atas isu-isu yang dihadapi oleh otoritas maupun pelaku pasar.

Perjuangkan inklusi keuangan

Salah satu bidang di PKSK ada yang khusus menangani kebijakan keuangan inklusif. Topik ini sendiri memang telah dijadikan pemerintah sebagai strategi nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional

Keuangan Inklusif, definisi keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Topik ini menjadi isu pembangunan yang bersifat multisektoral, banyak institusi yang terlibat di dalamnya. Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian dan lembaga lain merupakan anggota dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang diketuai sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Dalam konteks tersebut, PKSK merupakan *focal point* pengembangan kebijakan keuangan inklusif di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sistem keuangan yang inklusif memiliki arti bahwa setiap kelompok masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan formal, baik berupa simpanan, pinjaman, maupun layanan keuangan lainnya. Akses terhadap layanan keuangan formal memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai produk layanan keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusif ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.

Jika tujuan itu tercapai, budaya masyarakat yang masih mengelola keuangannya secara tradisional akan berubah. Sehingga, pemerataan kemudahan akses masyarakat untuk

sektor keuangan yang kredibel dan aman akan terasa tidak timpang dan lebih adil. Lebih jauh perempuan lulusan University of Colorado at Denver ini menjelaskan, "Masyarakat yang terbiasa menyimpan uangnya di bawah bantal akan dapat menyimpan asetnya di bank, sehingga relatif terjaga dari risiko pencurian dan bencana. Terbukanya akses terhadap layanan keuangan, masyarakat mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan sektor keuangan untuk berbagai keperluan hidup dan untuk peningkatan kesejahteraan."

Partisipasi dorong inklusi

Berdasarkan data Global Findex yang dikeluarkan oleh World Bank, tingkat keuangan inklusif Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar 48,86 persen, meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun 2011 yang tercatat di angka 19,60 persen. Capaian Indonesia ini bahkan dinilai sebagai peningkatan terbesar dari negara *emerging* di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Selain itu, data Global Findex menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kesetaraan yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam hal kepemilikan rekening pada institusi keuangan formal, yaitu sebesar 46,25 persen untuk laki-laki dan 51,35 persen untuk perempuan. Capaian tersebut masih sejalan dengan target Pemerintah. Dalam SNKI, Pemerintah telah menetapkan target keuangan inklusif sebesar 75 persen pada tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah terus berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait, antara lain BI dan OJK.

Agar target keuangan inklusif itu bisa tercapai, perlu didukung dengan partisipasi penuh seluruh lapisan

masyarakat. "Apabila masyarakat memahami pentingnya keuangan inklusif dan bagaimana akses terhadap layanan keuangan formal dapat meningkatkan kesejahteraan, mereka tentu akan terdorong untuk memanfaatkan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan" pesan Ayu. Pemanfaatan produk dan layanan tersebut dapat melindungi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk mereka yang bekerja di tanah rantau, dapat dengan cepat dan mudah mengirimkan uang kepada anggota keluarganya. Para pelaku usaha pun dapat memperoleh akses terhadap pembiayaan untuk memulai atau memperbesar usahanya. Hal-hal tersebut adalah contoh kecil bagaimana keuangan inklusif dapat membantu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa keuangan inklusif berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa keuangan inklusif merupakan topik global yang hangat diperbincangkan. Keuangan inklusif telah dan tetap menjadi salah satu topik utama dalam berbagai forum internasional, seperti G-20, ASEAN, dan APEC. Melalui penetapan SNKI, Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk mengakselerasi peningkatan keuangan inklusif di Indonesia, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal guna meningkatkan kesejahteraannya.

Teks Dimach Putra

Melayani Sepenuh Hati

Rionald Silaban,

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Sembari duduk tenang, anak kecil itu takzim menunggu waktu makan. Ia tak sendirian. Bersama kelima saudaranya, ia duduk mengelilingi sebidang meja kayu tempat menyantap makanan. Meski berbagai hidangan sudah siap di atas meja, mereka tak lantas makan dan menghabiskannya. Sudah menjadi keharusan bagi dirinya dan saudaranya untuk menunggu kehadiran sang kepala keluarga. Selepas sang ayah datang dan mulai makan, mereka pun diperbolehkan untuk mengambil makanan. Dengan begitu, rasa hormat kepada orang tua dan kekeluargaan terbentuk di dalam pribadi anak itu dan para saudaranya.

Meja makan persegi panjang itu pun menjadi salah satu saksi bisu dari

sedikit cerita masa kecil pejabat eselon I di Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan (BPPK). Rio, sebagaimana ia sering disapa, belajar banyak nilai dari kedua orang tuanya. Menurutnya, ajaran dari orang tuanya lah yang sangat membantu dirinya dalam mencari nilai-nilai kehidupannya sendiri.

“Waktu saya beranjak dewasa, selalu ada *values* di luar rumah dan di dalam rumah. Jadi menyiapkan anak dengan *values* dari dalam rumah itu penting, sehingga anak itu bisa *men-screening values* yang ada di luar rumah. Apa yang perlu diambil dan mana yang tidak perlu diambil. Menurut saya, *values* itulah yang menolong saya,” ceritanya.



Foto
Anas Nur
Huda.

Foto
Anas Nur Huda



Rio saat melantik Widyaiswara Utama dan Lektor di Lingkungan BPPK

Foto Dok. BPPK

Di sisi lain, sang opung (panggilan nenek) juga turut menginspirasi Rio. Meski tak bisa baca tulis, opungnya sering memberikan nasehat bijak bagi Rio dalam melakukan sesuatu dan memilih. Terkadang, nasehat yang diberikan di luar nalarnya. Hal itu menjadi penting mengingat Rio mempunyai niat baik untuk berkontribusi membangun Indonesia. Menurutnya, Indonesia bisa maju tidak hanya dengan mengandalkan tingkat pengetahuan yang tinggi, namun yang jauh lebih penting adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang bijak dan bermartabat. “Bijak is *different than having a higher knowledge*. Itu yang menurut saya lebih penting,” ungkap Rio.

Pembantu lintas menteri

Tak lama setelah masuk di Kementerian Keuangan pada tahun 1990, ia pun memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan masternya ke Georgetown University, Washington, Amerika Serikat dengan jurusan *Common Law*. Paska menyelesaikan pendidikannya, Rio pun kembali ke Indonesia.

Rio muda merasa beruntung karena dapat membantu Menteri Keuangan (Menkeu) secara langsung. Saat itu, jabatan Menkeu sudah beralih kepada Mari’e Muhammad yang terkenal dengan julukan Mr. Clean. Cerita menarik pun ia alami. Pernah suatu saat, Menkeu Mar’ie mencari seseorang yang bisa

mengetik. Saat itu, keterampilan mengetik belum banyak dimiliki. Kebetulan Rio pernah mengikuti kursus teknik mengetik sepuluh jari. Ia pun diminta membantu Mar’ie secara langsung. Berkat kemampuannya, ia dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Pengalaman berharga itulah yang membuatnya menjadi lebih percaya diri.

“Ketika jadi pegawai, kalau ada Dirjen memanggil saya, saya bisa menghadapi mereka dengan sopan namun tidak *minder*. Saya bisa berpendapat dengan baik, tetapi tidak kurang ajar. Dan saya juga mendapat pengalaman. Menurut saya itu keberuntungan bagi saya,” kenangnya.

Selepas Mar’ie menjadi Menkeu, beberapa Menkeu lain yang pernah dibantunya adalah Bambang Subiyanto, Boediono, Jusuf Anwar, Sri Mulyani Indrawati, Agus D.W. Martowardodjo, Muhamad Chatib Basri, dan terakhir kembali melayani Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, ia juga pernah membantu penyelesaian restrukturisasi aset negara dalam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2000. Ia juga belajar banyak terkait keadaan korporasi di Indonesia dengan terjadinya krisis tahun 1998. Selepas Menkeu Boediono tahun 2004, ia pun dipromosikan untuk menjadi *Senior Advisor* pada Bank Dunia.

Selain itu, Rio juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan pada tahun 2008 dan dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi pada tahun 2012. Tak berakhir di posisi tersebut, kariernya menanjak pada tahun 2014 dengan dipercayakannya jabatan *Executive Director* Bank Dunia untuk konstituen *Southeast Asia Voting Group* (SEAVG) kepada dirinya. Dua tahun

berkarier di organisasi internasional, ia pun kembali ke Indonesia pada tahun 2016 dan menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional. Tak menunggu lama, pada Juni 2018 ia dipercaya menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Konservatif yang bersahaja

Bercerita perjuangan kedua orang tuanya, Rio menuturkan kisah perjalanan sang ayah, M.H. Silaban, dan sang ibu, TAT Nababan, yang merantau ke Jakarta dari Sumatera pada tahun lima puluhan. Meski berjuang dari nol, orang tua Rio tidak pernah putus asa di ibukota. Hal itu lah yang turut memberi semangat dan inspirasi bagi Rio dan kelima saudara kandungnya.

Sosok ayahnya yang berprofesi sebagai Jaksa merupakan sosok yang taat dan disiplin. Setiap pagi, Rio dan saudara-saudaranya duduk di karpet ruang tengah keluarga. Sang ayah rutin memimpin kebaktian dengan membaca beberapa ayat doa di pagi hari. Hal itu sudah menjadi rutinitas yang diterapkan di keluarganya sebelum berangkat kerja ataupun bersekolah.

Selain itu, nilai agama dan adat istiadat masih kental di dalam keluarganya. Ayah menjadi sosok kepala keluarga yang dipatuhi dan dilayani. Hampir setiap hari ketika sang ayah pulang kerja, Rio dan saudaranya berbagi tugas menjemput sang ayah. Ada yang berlari membawakan tas kerjanya, ada pula yang mengambilkan baju ganti sang ayah. Rio sendiri sering bertugas untuk membukakan sepatu dan kaos kaki Ayahnya.

Sang ibu juga menjadi sosok teladan bagi Rio. Ibunya yang sempat bekerja

sebagai Kepala Sekolah Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta (PKSD) memutuskan untuk berhenti karena ingin fokus mengurus anak-anaknya yang beranjak dewasa. Kedua sosok orang tua tersebut menjadi sosok penting yang membentuk nilai-nilai kepribadian Rio.

Menghormati waktu akhir pekan

Menjadikan akhir pekan menjadi waktu khusus untuk keluarga adalah salah satu prinsip yang dipegang Rio. Menurutnya, siap menjadi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan berarti siap untuk memberikan waktu lebih untuk institusi. Hal itu sudah dimaklumi oleh istri Rio, Desiree Pellokila, dan anaknya, Adhara Maika Ryauli Silaban. Sebagai gantinya, akhir pekan menjadi waktu khusus bagi keluarganya.

“Kalau kamu sudah eselon tiga, *basically you are ready giving up some of your private life*. You don’t have the luxury untuk pulang jam lima. Artinya kalau jadi pejabat di Keuangan itulah risikonya. Itu penting menurut saya. Jadi, kita harus menghormati *weekend* orang lain, karena mungkin saja hanya di *weekend* dia bisa ketemu dengan keluarganya,” urainya.

Rio sendiri memiliki ritual khusus di akhir pekan. Setiap Sabtu, ia sengaja bangun jam empat dini hari untuk pemanasan bermain golf sebagai olahraga favoritnya. Tak lama bermain golf, ia langsung segera pulang agar dapat makan siang bersama istri dan anak di rumah.

Pada hari Minggu, tak jarang Rio mengajak makan bersama kedua orang tuanya. Orang tua yang masih hidup dan sehat menjadi salah satu alasan Rio untuk rutin mengunjungi setiap akhir pekan. “Bapak saya itu sekarang umurnya 87 tahun dan ibu saya sekarang umurnya 83 tahun. Jadi saya termasuk orang yang

beruntung masih bisa ketemu bapak ibu saya. Oleh karena itu, saya selalu usahakan kalau hari Minggu ketemu bapak ibu. Saya ajak mereka untuk makan di luar rumah,” ungkapnya.

Harapan

Birokrasi yang profesional menjadi salah satu harapan Rio terhadap institusinya. Saat ini, ia percaya bahwa Kementerian Keuangan memiliki sistem rekrutmen yang bagus, sehingga kemampuan para pegawai mudanya pun tak perlu diragukan. Hal itu menjadi penting karena mereka kelak yang akan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan.

“Jadi kalau birokrasi kita profesional, kita menjadi institusi yang dihargai, maka orang akan hormat dan lihat kita sebagai cerminan Indonesia. Itu yang saya harapkan dari generasi muda di Kementerian Keuangan. Misalnya, *in time of crisis, can we not deal with how to address the issue*. Itu penting, bagaimana dunia melihat kita dan bagaimana rakyat melihat kita (sebagai birokrat profesional),” terangnya.

Kementerian Keuangan juga menjadi salah satu institusi terbaik di Indonesia yang berhasil menerapkan reformasi birokrasi. Namun demikian, Rio mengingatkan agar tidak kehilangan jiwa melayani. “Yang penting itu sebetulnya adalah melayani karena kita berbuat. Orang itu memang kadang-kadang sering kehilangan perspektif. Mereka pikir kalau orang yang melayani adalah orang yang rendah, itu salah. Kalau kamu layani orang, maka kita wajib menghargai orang yang melayani kita,” pesannya.

Teks Abdul Aziz

Pertumbuhan Ekonomi Masih Tertahan Global

Peningkatan ekspor dan pengendalian impor merupakan kunci untuk meredakan gejolak CAD

Foto
Anas Nur Huda

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2018 baru saja dirilis. Hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi. Tingginya permintaan masih tertahan oleh kondisi perekonomian dunia yang berpengaruh pada menurunnya tingkat ekspor bersih Indonesia. Ke depan, Pemerintah perlu terus melanjutkan upaya-upaya yang berkenaan dengan peningkatan ketahanan ekonomi domestik.

Pertumbuhan Ekonomi Tetap Solid

Sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2018, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di kuartal terakhir mencapai 5.2 persen (*year on year*). Pertumbuhan ini sama dengan kuartal sebelumnya, sehingga bisa dikatakan bahwa pertumbuhan PDB cukup solid dan stabil. Pertumbuhan yang tetap ini sebetulnya merupakan bentuk normalisasi, setelah aktivitas ekonomi

sempat bertumbuh sangat cepat di periode-periode sebelumnya. Hal ini seiring dengan besarnya permintaan domestik untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.

Pertumbuhan PDB didukung oleh permintaan domestik yang meningkat sebagaimana tercermin dalam peningkatan pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) menuju 7 persen (*yoy*), setelah mengalami moderasi di kuartal sebelumnya. Peningkatan PMTB ini dapat membantu menopang konsumsi rumah tangga yang menurun menuju 5.1 persen (*yoy*) seiring usainya kegiatan-kegiatan besar seperti hari raya keagamaan.

Meskipun mengalami penurunan, pertumbuhan tahunan konsumsi rumah tangga ini masih melebihi rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam empat tahun terakhir. Pengeluaran pemerintah meningkat cukup tinggi dari 5.2 persen (*yoy*) di kuartal sebelumnya menuju 7.0 persen (*yoy*). Selanjutnya, oleh karena turunnya perkembangan perdagangan di tingkat global, pertumbuhan nilai ekspor bersih turut menurun.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi merata di setiap sektor dengan pertumbuhan yang semakin cepat, kecuali sektor pertanian dan utilitas. Menurunnya pertumbuhan sektor pertanian diantaranya disebabkan oleh usainya periode panen untuk tanaman pangan, serta melambatnya perkembangan *plantation* seiring dengan turunnya harga komoditas, seperti

minyak kelapa sawit dan karet. Sementara itu, penurunan pertumbuhan utilitas bisa dikaitkan dengan menurunnya pertumbuhan permintaan listrik seiring rasionalisasi proyek listrik.

Sebagaimana tercermin dari komponen ekspor bersih dalam perhitungan PDB, neraca pembayaran di kuartal ketiga 2018 juga merefleksikan kondisi yang sama. Kondisi eksternal turut membawa defisit neraca pembayaran Indonesia melebar menuju 4.4 miliar dolar AS. Apabila kita melihat lebih dalam pada *breakdown* dari neraca pembayaran, pelebaran ini merupakan dampak dari melebarnya defisit neraca transaksi berjalan yang merupakan indikator yang mewakili posisi keluar masuknya devisa jangka pendek.

Indikasi pada High Frequency Indicators

Neraca transaksi berjalan melebar menuju 8.8 miliar dolar AS atau 3.4 persen terhadap PDB di kuartal ketiga 2018 (kuartal sebelumnya 3.04 persen terhadap PDB). Penyebab utama defisit ini adalah (i) kondisi perdagangan global yang belum membaik, (ii) masalah struktural, yaitu defisit neraca perdagangan minyak dan gas, dan (iii) tingginya defisit sektor transportasi ke luar Indonesia seiring pelaksanaan ibadah haji. Defisit ini mengalahkan surplus yang berhasil dibukukan oleh sektor modal dan keuangan sebesar 4.2 miliar dolar AS, seiring tingginya aliran dana asing riil (*Foreign Direct Investment* atau FDI).

Selanjutnya, melihat data bulanan, indikasi normalisasi pertumbuhan ekonomi terlihat juga pada Nikkei/Markit Indonesia Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) yang kembali turun ke 50.5 di bulan Oktober 2018. Terdapat indikasi bahwa turunnya indeks ini disebabkan oleh permintaan yang mengalami moderasi sebagaimana terlihat dari penurunan pemesanan dan penjualan ke luar negeri (ekspor).

High frequency indicators lainnya seperti neraca perdagangan juga

menunjukkan adanya indikasi moderasi perekonomian. Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 1.8 miliar dolar AS, setelah di bulan sebelumnya mengalami surplus sebesar 0.3 miliar dolar AS. Ekspor mengalami pertumbuhan secara *yoy* sebesar 3.7 persen, sangat kecil apabila dibandingkan dengan pertumbuhan impor secara *yoy* sebesar 23.7 persen. Penyebab utama dari defisit yang kembali terjadi ini adalah neraca perdagangan minyak dan gas yang membengkak akibat tingginya harga komoditas dunia serta terdepresiasinya Rupiah.

Stabilitas Harga termasuk Aset Keuangan Cukup Baik

Dari segi stabilitas harga di dalam negeri, dapat dilihat bahwa usaha Pemerintah untuk tidak menaikkan harga cukup berhasil. Meskipun periode panen raya untuk bahan pangan sudah berakhir, inflasi hanya naik sedikit sebesar 0.3 *percentage point* ke 3.2 persen (*yoy*) di bulan Oktober 2018. Kontribusi terbesar diberikan oleh harga pangan, disusul dengan harga yang diatur pemerintah.

Inflasi bahan pangan terjadi seiring berkurangnya persediaan bahan pangan setelah periode panen berakhir, sehingga harga beberapa komoditas seperti cabai merah, beras, dan jeruk meningkat lebih cepat di bulan Oktober. Selain itu, harga diatur Pemerintah juga meningkat lebih cepat seiring penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh PT Pertamina. Sedangkan tingkat Inflasi inti tidak mengalami perubahan di bulan Oktober 2018 pada 2.9 persen (*yoy*).

Meskipun neraca perdagangan defisit di bulan Oktober, cadangan devisa nyatanya meningkat sebesar 315 juta dolar AS menuju 115.2 miliar dolar AS. Kenaikan cadangan devisa ini terjadi pertama kali sepanjang tahun 2018 seiring meningkatnya aliran dana penerimaan negara dari sektor minyak dan gas, serta pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Kenaikan cadangan devisa juga sebagian disumbang oleh baiknya performa sektor keuangan Indonesia. Dalam periode 30 hari menuju 9 November 2018, Rupiah terapresiasi sebesar 3.8 persen, tingkat imbal hasil obligasi negara menurun dalam semua tenor (untuk tingkat imbal hasil obligasi negara favorit dengan tenor 5 tahun penurunannya sebesar 27 basis poin). Selain itu, dari pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga meningkat 0.9 persen.

Kebijakan Tetap Akomodatif terhadap Risiko Eksternal

Seiring dengan masih defisitnya neraca transaksi berjalan, seluruh kebijakan dari Pemerintah dan otoritas terkait akan diarahkan untuk meningkatkan kondisi neraca transaksi berjalan. Bank Indonesia dalam rapat dewan gubernurnya yang terakhir di bulan November 2018 memutuskan untuk menaikkan tingkat bunga acuan, yaitu *7-Day Reverse Repo Rate* (7DRRR) sebesar 25 basis poin menuju 6 persen. Hal ini diikuti dengan penyesuaian *Deposit* dan *Lending Facility* ke atas dengan jumlah yang sama.

Kebijakan Pemerintah juga masih diarahkan untuk menstabilisasi impor (misalnya melalui pengenaan pajak yang lebih tinggi untuk barang konsumsi impor serta penerapan kebijakan kandungan lokal), serta meningkatkan daya saing ekspor. Dari sektor keuangan, kebijakan konversi Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke dalam Rupiah juga tetap digalakkan.

Dari sisi fiskal, dapat dilaporkan bahwa APBN 2019 telah disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI dengan posisi kebijakan fiskal ditargetkan konsolidasi ke tingkat di 1.84 persen terhadap PDB. Hal ini berarti Pemerintah memberikan sinyal bahwa pihaknya tidak ingin memberikan kontribusi pada defisit neraca transaksi berjalan dengan menjaga defisit fiskal di level yang sangat aman (jauh dari batasan 3 persen terhadap PDB).

**Firman Bunyamin**

Kepala Seksi Bilateral IV
Direktorat Kepabebean Internasional dan Antar
Lembaga
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Current Account Deficit (CAD) dan Peran Bea Cukai

Memasuki 2018, perekonomian Indonesia menghadapi ketidakpastian global terutama akibat perang dagang antara US dan China. Kondisi ini mempengaruhi tingkat kepercayaan investor, sekaligus menekan rupiah pada titik yang cukup rendah. Karena investasi swasta yang dibiayai utang asing dan defisit neraca perdagangan masih meningkat, maka CAD Indonesia pada kuartal II 2018 sempat menyentuh angka 3 persen dari PDB.

Peningkatan CAD banyak dipengaruhi oleh menurunnya surplus nonmigas ditengah kenaikan defisit migas. Penurunan surplus nonmigas terutama disebabkan oleh meningkatnya impor bahan baku dan penolong sebesar 12,82 yoy periode Januari-Agustus 2018, sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas industri pengolahan di saat menurunnya ekspor nonmigas. Peningkatan defisit perdagangan migas diantaranya disebabkan oleh meningkatnya impor terutama pada Agustus 2018 sebesar 56,58 persen dibandingkan Agustus 2017, seiring dengan meningkatnya tren harga minyak dunia dan permintaan selama

periode Januari-Agustus 2018.

Sementara itu, merujuk *Global Value Chains (GVCs) index* dan *Economic Complexity Index (ECI)*, Indonesia masih dalam kategori ekonomi yang tingkat produksinya masih belum kompleks. Index GVC terakhir Indonesia sebesar 43,5 lebih rendah dibandingkan dengan negara Thailand sebesar 54,3 menunjukkan rantai produksi yang lebih sederhana. Angka ECI sebesar -0,25 berada pada urutan 73 di bawah Thailand pada urutan 36 dengan nilai 0,67 (menunjukkan intensitas teknologi dalam produksi masih rendah). Hal itu berimplikasi pada ekspor Indonesia yang didominasi komoditas alam seperti minyak bumi, CPO, batubara, dan karet, dan manufaktur tingkat rendah (tekstil dan alas kaki).

Posisi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk meredakan gejala CAD sangat signifikan, terutama pada poin pertama arahan Presiden, yaitu memperkuat cadangan devisa. Jika dipecah lagi maka penguatan cadangan devisa dapat dilakukan melalui (1) mendorong ekspor (2) mendorong substitusi impor (*expenditure switching*), dan (3) mengendalikan impor. Ketiga usaha tersebut dapat dilakukan untuk mendapatkan efek jangka pendek maupun jangka panjang

Untuk jangka pendek, pemerintah termasuk DJBC telah melakukan beberapa kebijakan penggunaan bio-diesel sebagai substitusi impor, penyesuaian tarif pph pasal 22 impor, insentif Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), layanan *online single submission* (OSS), kemudahan layanan *e-commerce*, pengawasan dan pengamanan dana hasil ekspor (DHE), pemberlakuan kewajiban LC atas ekspor komoditi, mendorong perlakuan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) di negara tujuan.

Teks Adelia Pratiwi
Staf Khusus Kepala Badan Kebijakan Fiskal,
Seconded Bank Dunia

Selain itu pengendalian impor dilakukan dengan verifikasi nilai pabean barang impor berisiko tinggi sehingga *tax-base* pengenaan pungutan impor semakin meningkat. Untuk jangka panjang, tujuan yang harus dicapai adalah mendorong ekspor melalui peningkatan ekspor manufaktur tingkat tinggi menggunakan proses produksi yang lebih canggih, sehingga menghasilkan barang jadi dengan nilai tambah tinggi seperti suku cadang dan otomotif, elektronik, dan computer. Hal ini ditandai dengan meningkatnya index GVC dan ECI.

Kebijakan yang dapat dilakukan DJBC adalah dengan menarik investasi asing langsung melalui insentif yang ditawarkan oleh pemerintah, sekaligus memanfaatkan berbagai skema *Free Trade Agreement* (FTA) untuk membuka akses pasar Indonesia di negara tujuan. Penarikan investasi asing dapat dilakukan dengan memberikan berbagai insentif seperti pengembangan fasilitas Kawasan berikat (KB)/Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terutama untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan *e-commerce* sehingga mempunyai akses pasar internasional, otomasi pelayanan dan relaksasi prosedur ekspor, kemudahan dan penyederhanaan insentif fiskal, serta penyederhanaan dan otomasi proses restitusi.

Sementara pemanfaatan FTA dapat dilakukan dengan menyampaikan *request* akses pasar untuk produk manufaktur, dan pada saat yang sama menyusun kesepakatan dan *Rules of Origin* yang akomodatif terhadap ekspor manufaktur, misalnya penetapan prosentasi *Regional Value Content* (RVC) seminimal mungkin sehingga Indonesia dapat memproduksi barang dengan proporsi material berasal dari berbagai negara yang tidak dapat dipenuhi domestik Indonesia lebih besar.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Dering DJPK

1500420



Butuh informasi
atau konsultasi ?

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ✓
Pajak dan Retribusi Daerah ✓
Hibah dan Pinjaman Daerah ✓
Dana Insentif Daerah, Dana Otsus ✓
Analisis APBD, dan sebagainya ✓

Hubungi kami **Dering DJPK 1500420**

- ✓ Dilayani Petugas Konsultan yang berkompeten
- ✓ Setiap Pertanyaan tercatat dalam Berita Acara Konsultasi
- ✓ Didukung sistem management call center yang terintegrasi

Senin - Jumat (hari kerja) pk 08.00 - 16.00 WIB

Email : call.centerdjpk@kemenkeu.go.id

Fax: 021-3509443

www.djpk.kemenkeu.go.id

Anggaran dan Kesejahteraan Rakyat

Ahmad Irsan A. Moeis,
Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran*)

Tahun fiskal 2018 akan segera berakhir. Sementara tahun depan merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Ini berarti, APBN 2019 menjadi instrumen fiskal terakhir dalam kerangka pembangunan jangka menengah untuk mensejahterakan rakyat. Pertanyaannya, sudah sejauh mana peran APBN mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan apa saja tantangan yang akan dihadapi pemerintah guna mewujudkan tujuan RPJMN di tahun terakhir.

Melalui Nota Keuangan dan APBN 2019, pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran hingga di bawah 5 persen atau setidaknya berada pada kisaran 4,8-5,2 persen. Melalui perluasan kesempatan kerja dan penurunan pengangguran, pemerintah berhasil meningkatkan angkatan kerja sebesar 6,89 persen atau setara dengan 8,62 juta orang, yakni dari 125,32 juta angkatan kerja pada Februari 2014 menjadi 133,94 juta angkatan kerja pada Februari 2018.

Peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja, dari 118,17 juta orang menjadi 127,07 juta orang pada periode yang sama. Selanjutnya, jumlah pengangguran juga berhasil ditekan di bawah 7 juta orang. Ini merupakan jumlah terendah sejak tahun 2000. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen atau dari 7,15 juta orang menjadi 6,87 juta orang.

Optimisme tercapainya target pada 2019 tidak hanya didasarkan pada pencapaian selama kurun waktu 2014-2018, namun juga berdasarkan pada

kepekaan pengambil kebijakan terhadap masalah dan tantangan di masa depan. Kepekaan ini ditunjukkan dengan ketetapan pemerintah terkait peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja pada sektor pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya sebagai prioritas nasional. Ketetapan didasarkan pada belum optimalnya penciptaan nilai tambah perekonomian dari pemanfaatan modal dasar pembangunan, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Berikutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga belum secara optimal didorong sebagai pemicu nilai tambah ekonomi.

Sensitivitas pemerintah terlihat dengan perumusan lima program prioritas tahun 2019 untuk mengatasi permasalahan dimaksud. Kelima program prioritas tersebut meliputi peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian; percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan; peningkatan nilai tambah pariwisata dan jasa produktif lainnya; percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja; dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini bertujuan agar perekonomian mampu tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Keberhasilan menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan berdampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 9,82 persen atau setara dengan 25,95 juta orang pada Maret 2018. Angka ini merupakan angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia. Padahal pemerintah telah menaikkan 33

persen pengukuran garis kemiskinan, yaitu dari Rp302.735/kapita/bulan pada Maret 2014 menjadi Rp401.220/kapita/bulan pada Maret 2018.

Secara spasial jumlah penduduk miskin perkotaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin perdesaan. Pada Maret 2018, perkotaan memiliki 10,14 juta jiwa orang miskin atau 7,02 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 10,51 juta jiwa atau 8,34 persen. Sementara, perdesaan memiliki 15,81 juta jiwa orang miskin setara dengan 13,20 persen pada Maret 2018. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, dimana jumlah orang miskin sebesar 17,77 juta jiwa atau 14,17 persen.

Berdasarkan pencapaian di atas, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 persen sampai 9,5 persen. Oleh sebab itu, pada 2019 pemerintah meletakkan pembangunan manusia menjadi prioritas pembangunan nasional



melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Hal tersebut mempertimbangkan permasalahan

dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun depan, yaitu penurunan kemiskinan yang masih melambat; belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat; ketersediaan dan akses terhadap kualitas layanan pendidikan yang belum merata; akses rumah tangga terhadap perumahan dan pemukiman layak yang juga belum merata; dan tata kelola layanan dasar yang belum terlaksana sesuai standar.

Selanjutnya, pemerintah juga berhasil menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat, namun dengan tingkat yang relatif kecil. Rasio gini turun dari level 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,389 pada Maret 2018. Meski kecil, hal ini mengindikasikan terjadi perbaikan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Keberhasilan ini melahirkan optimisme terhadap pemenuhan target rasio gini pada kisaran 0,38- 0,39 pada tahun 2019.

Menyadari tantangan masa depan, pemerintah mengarahkan kebijakan penganggaran untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah terdepan, terluar dan tertinggal dengan target rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15,0-15,5 persen; meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mencapai 6,9-7,1 persen; rasio biaya logistik terhadap PDB menjadi 19,2 persen; dan *ICT development index* mencapai 4,9-5,2.

Kemudian, pemerintah juga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah

Ilustrasi
Dimach Putra

Kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 9,82 persen atau setara dengan 25,95 juta orang pada Maret 2018. Angka ini merupakan angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia.

indikator penting dalam mengukur keberhasilan membangun kualitas hidup manusia. Melalui IPM dapat diketahui kemudahan akses penduduk terhadap hasil pembangunan seperti akses memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM memiliki tiga komponen dasar berupa umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Dengan demikian, peningkatan IPM mengindikasikan terjadinya peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Memperhatikan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan IPM dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017. Maka, target meningkatkan IPM mencapai 71,98 pada tahun 2019 menjadi cukup realistis.

Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa upaya pengurangan kesenjangan di bidang pendidikan membutuhkan kelanjutan pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun agar terjadi peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Hal ini dilakukan melalui penerapan BOP Kesetaraan, memperkuat pendidikan vokasi khususnya melalui sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama dalam peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Sementara, untuk bidang kesehatan tantangan yang harus diselesaikan adalah mengarahkan anggaran kesehatan untuk mengurangi ketimpangan fasilitas kesehatan dan penyebaran tenaga kesehatan antarwilayah. Selanjutnya, penguatan untuk program promotif dan preventif dalam penanganan isu *stunting* dan efektivitas program jaminan kesehatan.

Berikutnya, terdapat empat isu yang perlu menjadi perhatian para perumus kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, bahwa bonus demografi tidak otomatis membawa pengaruh positif bagi perekonomian. Hal ini sangat bergantung kepada produktivitas dari kelompok usia bekerja. Pemerintah perlu mendorong peningkatan produktivitas kelompok ini melalui pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja serta digitalisasi ekonomi dan usaha yang mengarah pada industri 4.0. Tanpa memiliki keahlian dan produktivitas yang tepat, keberadaan kelompok usia produktif ini justru akan menjadi masalah baru dalam perekonomian dan beban bagi anggaran negara.

Kedua, pemerintah harus mulai memperhatikan semakin menuanya penduduk karena peningkatan angka harapan hidup individu. Data dari The United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) pada 2015 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia memiliki kesempatan hidup hingga usia 71 tahun pada tahun 2025-2030, dengan proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas sebesar 21,5 persen dari total populasi pada tahun 2050. Tanpa jaminan pensiun yang layak, maka terdapat potensi terjadinya pergeseran kemiskinan dari kelompok muda ke kelompok tua, yang jika tidak diantisipasi akan membutuhkan anggaran yang besar di masa depan untuk mengatasinya.

Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidaklah cukup. Selain menciptakan lapangan kerja yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan lapangan kerja baru seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja, pemerintah juga perlu menciptakan perluasan jenis pekerjaan yang memberi kesempatan kerja bagi para lansia yang masih produktif. Dengan menciptakan lansia yang mandiri, baik secara fisik maupun keuangan, maka dapat mengurangi beban anggaran negara untuk biaya kesehatan lansia, bahkan mereka justru tetap bisa berkontribusi bagi perekonomian.

Isu ketiga adalah menggeser pekerja sektor informal masuk pada sektor formal. Sektor informal adalah sektor yang tidak terjangkau sepenuhnya oleh pengawasan dan regulasi pemerintah. Dengan proporsi mencapai 58,22 persen dari total tenaga kerja yang tersedia, maka menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja.

Isu terakhir adalah kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Kurikulum pendidikan Indonesia masih menggunakan pendekatan siswa harus mengetahui semuanya, bukan menjadi ahli dalam suatu bidang. Padahal ekonomi berbasis digital membutuhkan orang memiliki keahlian akan suatu keterampilan, bukan mengetahui segalanya tapi tidak ahli.

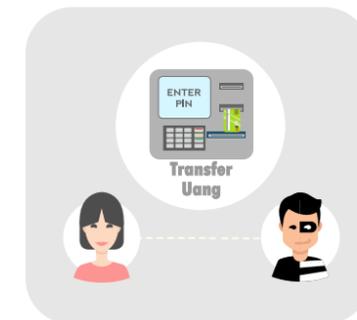
**) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*

WASPADA PENIPUAN

“**AYO KENALI CIRI-CIRINYA**”



Dihubungi langsung oleh petugas menggunakan nomor HP Pribadi



Tujuan transfer ke Rekening Pribadi



Kadang disertai ancaman (denda atau kurungan)



Jenis pungutan tidak wajar untuk transaksi online

Pembayaran Bea Masuk & Pajak Impor hanya menggunakan kode billing dan/atau dokumen SSPCP

Berikut ini contoh bentuk **REKENING PRIBADI** yang biasa digunakan dalam tindak **PENIPUAN** :

- A. Bank XYZ**
a.n. Upinep (Penipu) no. rek 66.666.6
- B. Bank XYZ**
Kantor BC Jakarta a.n. Upinep (Penipu) no. rek 66.666.6
- C. Bank XYZ**
Bendahara Kantor BC a.n. Upinep (Penipu) no. rek 66.666.6

 Jika Anda diminta transfer ke rekening seperti diatas (masih menyebutkan nama pemilik rekening) maka dipastikan **PENIPUAN**

Apabila Anda ragu silakan hubungi Bea Cukai

www.beacukai.go.id



@beacukaiRI
@bravobeacukai

BEA CUKAI
Makin Baik
MENGAWASI & MELAYANI



Kampung Pendidikan, Kampung Masa Depan

Senyuman tidak lepas dari wajah pemuda asal Kampung Lemo Sulawesi Barat itu. Betapa tidak, hari itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga menobatkannya sebagai Pemuda Pelopor di Bidang Pendidikan Tahun 2018. Sebuah penghargaan bagi para pemuda Indonesia yang menjadi pelopor perubahan melalui inovasi dan kreatifitasnya di bidang pendidikan. Dialah Hasan, lulusan magister pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang menyelesaikan pendidikannya melalui beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Bermula dari kegusaran akan kondisi anak-anak di kampung halamannya, Hasan menggarap Kampung Pendidikan. Selain keterbatasan pada pengetahuan dan wawasan, anak-anak di desanya juga terprovokasi modernisasi yang menjauhkan mereka dari kearifan lokal. Dengan menysasar anak-anak di kisaran usia dini hingga sekolah menengah atas, Kampung Pendidikan hadir. Di sini, anak-anak dibina agar bisa memaksimalkan potensi mereka melalui pendekatan muatan lokal.

Untuk anak usia dini hingga sekolah menengah pertama, Kampung Pendidikan memberi pembinaan di bidang agama, pengetahuan umum, dan budaya. Sementara itu, pengembangan kepemimpinan dan potensi ditujukan kepada anak usia sekolah menengah atas. Tokoh masyarakat dan orang tua peserta didik turut dilibatkan dalam kegiatan koordinasi dalam hal pengawasan.

Kehadiran kampung pendidikan memberikan angin segar

bagi perubahan signifikan di kampung Hasan. Kini, anak-anak Kampung Lemo Desa Kuajang Kabupaten Polewali Mandar mampu berbahasa Inggris dan Arab. Dalam melakukan pembinaan, Kampung Pendidikan senantiasa mengaitkannya dengan alam pedesaan, lingkungan sosial budaya, serta kebutuhan daerah. Hal ini juga membantu mengenalkan anak-anak pada permainan tradisional.

Dari Buku jadi Ilmu

Berbekal 2.200 eksemplar buku hasil donasi yang dia peroleh melalui sistem *door to door* semasa berkuliah di Jakarta, Hasan berhasil melakukan pendekatan kepada masyarakat di desanya guna memulai program Kampung Pendidikan. Inisiatif untuk membangun kampung halamannya, disadari Hasan perlu pendekatan tertentu. Maka, ia pun menyiapkan amunisi terbaik. Salah satunya melalui buku.

Untuk mengirimkan buku hasil donasi dari Jakarta ke desanya, Hasan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia dan Pustaka Gerak Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan. Sebab, biaya kirim buku-buku tersebut berbiaya besar. “Mencapai angka fantastis di kisaran Rp95 juta,” ungkapnya.

Tidak terbatas di situ, amunisi lain yang juga dipersiapkan Hasan adalah mencetak pengajar berkualitas. Hasan perlu repot-repot mendatangkan pengajar dari Pare Kediri ke kampungnya selama tiga bulan. Hal ini guna meningkatkan kompetensi Bahasa Inggris bagi sepuluh orang calon pengajar yang akan bergabung dengan Kampung Pendidikan.

“Melalui kesiapan para pengajar dan amunisi berupa buku, Saya dan teman-teman memulai Kegiatan Kampung Pendidikan pada April 2018,” kisahnya. Kini, Kampung Pendidikan telah memiliki 150 peserta didik yang dibina secara cuma-cuma.

Hobi jadi Ahli

Sebagai penyuka olahraga, Hasan memperoleh banyak penghargaan sejak

bangku sekolah. Selain sebagai hobi, Hasan menyadari, SDM berkualitas lahir dari kondisi jasmani dan rohani yang prima. Itu pula sebabnya, saat hendak melanjutkan pendidikan tinggi, bidang pendidikan olahraga dia jadikan pilihan utama.

Pemuda kelahiran 1990 ini kemudian mengambil gelar master bidang pendidikan olahraga di UNJ lewat beasiswa dari LPDP pada 2015. Usai menjalani pendidikan dengan indeks prestasi kumulatif yang nyaris sempurna, Hasan memutuskan pulang ke kampung halamannya. Membangun sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan, jadi prioritas utamanya. Kini, selain aktif mengurus Kampung Pendidikan, Hasan juga menjalani profesi sebagai dosen, sekaligus Kepala Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Al-Asyariah Mandar, Sulawesi Barat.

Ikut seleksi

Keikutsertaannya dalam seleksi beasiswa LPDP begitu disyukuri Hasan. Sebab dengan itu, keinginannya berkuliah di luar Pulau Sulawesi bisa dicapai. Diakui Hasan, berbagai kelebihan beasiswa LPDP membawanya mantap mengikuti seleksi. Selain memiliki ketentuan syarat yang jelas, Hasan menilai proses seleksi LPDP mampu menyaring calon *awardee* yang tidak sekadar cerdas secara intelektual, tetapi juga bervisi-misi memajukan Indonesia ke depan.

Dia menambahkan, keseluruhan biaya yang ditanggung selama masa perkuliahan, transparansi dan keterbukaan, hingga kegiatan pembekalan yang diberikan kepada para *awardee* menjadi nilai tambah tersendiri yang membedakan LPDP dengan beasiswa lainnya. Kepada Media Keuangan Hasan turut mengungkapkan harapannya kepada LPDP.

“Pertama, program persiapan keberangkatan (PK) agar dikembalikan ruhnya seperti pada pelaksanaan PK ke-1 hingga PK ke-70-an. Kedua, alumni *awardee* yang banyak tersebar di seluruh

Indonesia agar pada seleksi beasiswa program doktoral bisa menjadi prioritas, dengan catatan melihat latar belakang aktivitasnya selama menjadi alumni,” harapnya.

Tidak hanya belajar

Sejak di bangku sekolah, Hasan mengikuti seabreg kegiatan dan aktif di sejumlah organisasi sekolah. Begitupun selama menjalani masa pendidikan tinggi, Hasan kerap mengikuti berbagai seminar nasional maupun internasional. Selain aktif dalam Mata Garuda Pusat 2016-2017, Hasan juga menjalani peran sebagai lurah LPDP UNJ periode 2016-2017. Dia juga menjabat sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana seluruh Indonesia. Selain itu, bersama dengan rekan dari Sulawesi Barat dan Sumatera Barat, Hasan memelopori kegiatan literasi untuk anak pesisir. Target pertamanya jatuh pada Pulau Seribu, Jakarta tahun 2016.

“Kebutuhan masyarakat pulau Seribu akan hadirnya taman baca dan inovasi pendidikan dalam proses pembelajaran menggerakkan hati saya dan teman-teman untuk hadir setiap satu kali dalam seminggu,” ujarnya. Di samping itu, Hasan juga aktif dalam Pustaka Bergerak Indonesia. Sebuah kegiatan untuk menyalurkan bantuan buku-buku dari Ibu Kota Jakarta ke pelosok-pelosok negeri yang dilakukan pada tanggal 17 setiap bulannya.

Hasan menyadari, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Untuk itu dia berpesan untuk membuang jauh rasa takut terhadap saingan di luar diri. “Karena yang menjadi saingan kita adalah diri sendiri. Yakinkan diri untuk melangkah ke depan. Yakinkan diri untuk bisa kuliah dengan beasiswa. Selalu ada jalan jika sudah diniatkan, dan jangan lupa untuk berdoa dan berusaha,” pesannya.

Teks Farida Rosadi

Hasan mengajar anak-anak di Kampung Pendidikan

Foto dok. pribadi.



lpdp
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Pengadaan Barang/Jasa dengan Manfaat Sepandan

Teks N.E. Fatimah,
Kepala LPSE Sekretariat Jenderal



Ilustrasi
Arfindo Briyan

APNB merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara melalui tata kelola terintegrasi manajemen pembangunan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan.

Kinerja APBN tahun 2017 khususnya

dari sisi penyerapan anggaran mencapai 93,8 persen atau Rp2.001,6 triliun. Penyerapan anggaran dari belanja operasional meningkat dari 85,34 persen di tahun 2016 menjadi 96,9 persen.

Hal yang paling positif adalah penyerapan belanja modal. Pada tahun 2015 realisasinya mencapai 78 persen, tahun 2016 meningkat menjadi 82 persen, dan terakhir tahun 2017 mencapai 92 persen.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat upaya Pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja

negara. Dalam kegiatan belanja negara tersebut, peran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah menjadi sangat strategis. Selain memenuhi kebutuhan barang/jasa, PBJ pemerintah juga serta menggerakkan roda perekonomian melalui proses transaksi dengan para penyedia barang dan jasa.

Kebijakan yang berlaku

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi sempat menyampaikan harapannya akan deregulasi peraturan yang ada. Aturan-aturan terkait tata kelola pemerintah harus lebih fleksibel, agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang cepat. Namun, Presiden juga berpesan agar akuntabilitasnya tetap terjaga.

Arahan Presiden Jokowi menjadi masukan dalam penerbitan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Peraturan ini menjadi pengganti kebijakan PBJ sebelumnya.

Menurut LKPP, perubahan yang mendasar adalah penyederhanaan. Isi Perpres baru ini berkurang dari 19 bab dan 139 pasal menjadi 15 bab dengan 94 pasal. Substansi Perpres juga menghilangkan bagian penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan. Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas, dan fungsi organisasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya.

Hasil yang diharapkan

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PBJ tahun 2018 yang sedang berjalan. Apalagi, sekitar 36 persen atau Rp524 triliun belanja pemerintah pusat akan melalui proses pengadaan.

Pengadaan harus dikelola secara baik

agar tidak berdampak negatif pada APBN secara keseluruhan. Perpres ini membuka era baru dalam dunia pengadaan. Banyak insan pengadaan berharap pelaksanaan belanja pemerintah menjadi lebih hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini tercermin pada sambutan Menkeu dalam acara Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 di lingkungan Kementerian Keuangan. Menkeu mengatakan dirinya berharap regulasi baru ini akan menciptakan efisiensi dan menghindari sikap korupsi.

Perubahan ini bersifat fundamental dan harus dipahami secara rinci. Penerapan Perpres tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengadaan sebagai instrumen belanja yang transparan dan akuntabel.

Penyederhanaan regulasi membuka ruang untuk memperbanyak produk barang/jasa yang akan dimasukkan ke dalam katalog elektronik, termasuk secara intensif memberlakukan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Daerah. Tujuannya adalah meningkatkan penetrasi pasar dan peluang usaha bagi UMKM serta pengusaha lokal di daerah.

Selain itu, pengembangan aplikasi elektronik untuk berbagai jenis pengadaan harus menjadi perhatian. Misalnya, untuk pengadaan langsung yang rawan persekongkolan. Aplikasi elektronik juga memberi kesempatan kepada penyedia lain untuk melakukan kompetisi secara terbuka.

Hal lain yang tak kalah penting adalah mengembangkan sistem penilaian kinerja PBJ secara kontinyu dan informatif. Sistem ini dapat mendukung terciptanya pasar pengadaan di instansi pemerintah yang terbuka dan kompetitif.

Penyusunan strategi komunikasi yang tepat juga harus dilakukan agar para pemangku kepentingan dan penyedia barang/jasa memahami filosofi, ketentuan

dan prosedur kebijakan PBJ Pemerintah yang baru. Harapannya, para pihak tersebut dapat membantu pengawasan terhadap potensi/celah kecurangan dalam siklus PBJ pemerintah.

Pada tahun 2014, KPK pernah menyampaikan kajian pencegahan korupsi pada PBJ pemerintah. Pertama, tahap perencanaan dan persiapan (a.l: Paket dijual terlebih dulu kepada penyedia sebelum anggaran disahkan, Persekongkolan DPR, K/L/I, dan Penyedia, serta *Mark up* harga).

Kedua, tahap pemilihan penyedia, kontrak/SPK, dan pelaksanaan pekerjaan (a.l: persekongkolan pengelola pengadaan, manipulasi dokumen lelang, dan suap kepada pihak terkait).

Ketiga, tahap serah terima pekerjaan (a.l: Tidak melakukan pengecekan fisik dan Manipulasi dokumen serah terima pekerjaan). Terakhir, tahap manajemen hasil pengadaan (a.l: manipulasi laporan hasil pengadaan, tidak proaktif melakukan pengawasan, dan suap kepada APIP untuk menghilangkan temuan audit).

Kesimpulan

Hal yang penting untuk diwujudkan adalah bagaimana Perpres baru ini dapat meminimalisir ketidakefisienan dan terjadinya korupsi. Apalagi, tujuan pengadaan utama yang ingin dicapai dari terbitnya regulasi ini yaitu **Value for Money**. Artinya, menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

Seperti kita ketahui, korupsi adalah penyelewengan terhadap uang negara yang semestinya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pada korupsi dalam PBJ pemerintah, bukan hanya uang negara yang hilang, manfaat yang dibutuhkan dari proses pengadaan itu juga tidak akan optimal.

Tingkatkan Sumber Energi Geothermal, Kemenkeu Berikan Fasilitas Fiskal



Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.010/2018 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.010/2018 Tentang Perubahan Keenam PMK Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk

Foto ilustrasi Arfindo Briyan S

Meningkatnya populasi di Indonesia membutuhkan pasokan energi listrik yang sangat besar. Kebutuhan tersebut diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya. Namun, 90 persen pembangkit listrik masih menggunakan bahan baku fosil atau bahan tambang sebagai sumber energinya di mana bahan baku tersebut akan mengalami kelangkaan dalam beberapa tahun kedepan. Oleh sebab itu, diperlukan sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku fosil. Salah satunya adalah dengan membangun potensi energi dari panas bumi atau *geothermal* sebagai energi baru terbarukan.

Dalam rangka meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya pajak pertambahan nilai atau pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kebijakan ini dikeluarkan Kemenkeu dengan tujuan meningkatkan produksi energi terbarukan dan menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan. Kebijakan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.010/2018 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk. Aturan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk (PMK 137/2018).

Fasilitas Fiskal Pembebasan PPN, Pajak Penjualan dan Bea Masuk

Secara umum, impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan aturan yang berlaku. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap beberapa barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM dari kegiatan impor yang dilakukan.

Dalam aturan sebelumnya, beberapa barang impor yang dikecualikan adalah barang perwakilan negara asing beserta para pejabat yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia, barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan konservasi alam, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; barang pindahan TKI yang bekerja di luar negeri, PNS, anggota TNI atau Polri yang bertugas di luar negeri paling sedikit satu tahun. Aturan juga berlaku bagi barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan

pelintas batas sampai jumlah tertentu, barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum, perlengkapan militer, barang impor sementara, barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengajuan; obat, bahan terapi manusia yang diimpor dengan anggaran pemerintah untuk masyarakat; barang dan bahan yang diolah, dirakit, atau dipasang pada bahan lain yang mendapat fasilitas ekspor, dan barang dan bahan atau mesin yang diimpor oleh industri kecil dan menengah dengan menggunakan fasilitas impor untuk tujuan ekspor.

Penambahan Pengecualian

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf m PMK 137/2018, terdapat penambahan pengecualian impor barang yang tidak dikenakan pungutan bea masuk, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM. Dalam Pasal 2 ayat (3) huruf m disebutkan bahwa salah satu barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk adalah barang yang digunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi hulu minyak dan gas bumi, atau kegiatan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang

meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan. Aturan dalam PMK 137/2018 ini membebaskan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, yaitu kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan.

Apabila dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yaitu dalam Pasal 2 ayat (3) huruf m PMK Nomor 196/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk, salah satu barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi hulu minyak dan gas bumi serta eksplorasi dan eksploitasi panas bumi.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 4 PMK 137/2018, fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM dapat diberikan terhadap barang kena pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi hulu minyak dan gas bumi atau kegiatan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, sepanjang memenuhi persyaratan yaitu barang tersebut belum dapat diproduksi dalam negeri, barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri, tetapi belum memenuhi

spesifikasi yang dibutuhkan, atau barang yang sudah diproduksi dalam negeri, tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai bersamaan dengan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang tata caranya mengikuti ketentuan perundang-undangan Pabean.

Penutup

PMK137/2018 ini bertujuan untuk mendukung perusahaan panas bumi sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Dalam jangka panjang, diharapkan adanya penambahan penggunaan *geothermal* sebagai sumber energi listrik. Selain banyak sumber panas bumi, penggunaan *geothermal* juga lebih terjamin sustainabilitasnya.

Teks Budi Sulistyono

Dedikasi Tinggi Sang Anak Petani

Tak pernah terbayang oleh Winardi bahwa kelak dirinya menjadi abdi negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Apalagi menyandang gelar pegawai teladan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Sebuah penghargaan yang diterimanya langsung dari pucuk tertinggi pimpinan.

Pria kelahiran Pacitan ini berbinar saat menceritakan masa kecilnya. Hidup di desa, berkawan alam dan kesederhanaan. Masa kecil pria yang akrab dipanggil Win ini tak jauh dari sawah dan hewan ternak peliharaan keluarganya. Sejak kecil mendiang orangtuanya mendidik Winardi untuk bekerja keras. Sepulang sekolah, ia bertanggungjawab mengurus kambing dan domba.

Cita-cita anak petani ini waktu itu cukup sederhana, menjadi anggota TNI-ABRI. Harapan itu tumbuh karena

melihat sosok tetangganya, sebut saja Pak Kadim namanya. Win dan teman-termannya terpukau melihat sosok Pak Kadim yang gagah dengan baju lorengnya tiap pulang ke desa setelah bertugas. Saat ada waktu, sosok tersebut juga banyak membagi kisah pengalaman seru yang membuat Win makin tertarik ingin menjadi tentara.

Manusia bebas berencana, namun jalan Tuhan yang sudah terjamin kepastiannya. Beranjak mendekati masa kelulusan dari sekolah kejuruan (SMK) takdir mengantarkan langkahnya bertandang ke rumah seorang teman. Di sana ia membaca brosur pendaftaran STAN/Prodip Keuangan milik kolega temannya. Kesempatan untuk kuliah gratis itu sangat menarik minatnya. Dengan mantap ia memohon restu kedua orang tua untuk berangkat mendaftar ke Balai Diklat Keuangan di Malang. Malam itu juga setelah mendapat izin, ia dan temannya berangkat karena kesempatannya mendaftar hanya tinggal esok hari.

Setelah menjalani serangkaian tes, Winardi dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa D-1 STAN/Prodip Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara Tahun Ajaran 1997-1998. Selepas kuliah ia menjalani penempatan pertamanya di KPKN Pangkalan Bun. Setelah dua puluh tahun mengabdikan dengan dedikasi tinggi, kini pria ini menjalankan tugasnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kehormatan menjadi teladan

Suatu siang Winardi diminta untuk menulis sebuah esai seputar pengalaman kerja yang memiliki nilai inspirasi bagi pegawai lainnya. "Deadline-nya besok, jadi sore itu juga saya langsung kerjakan esai tersebut," kisahnya. Keesokan harinya



Win saat mendapat penghargaan langsung dari Menteri Keuangan

Foto Resha Aditya

tulisan yang sudah dibuatnya dalam waktu singkat tersebut diserahkan ke Kasubbag Kepegawaian di kantornya.

Rupanya, esai tersebut merupakan salah satu syarat bagi Winardi untuk dapat diikutkan dalam kontestasi pemilihan pegawai teladan di lingkungan DJPb. Menurut catatan yang dimiliki oleh bagian kepegawaian dan bagian kepatuhan internal Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan dirinya layak memenuhi semua kriteria administrasi untuk mendapatkan gelar pegawai teladan tersebut. Dari proses internal di kantornya tersebut lantas dieskalasi hingga ke pusat.

Puncaknya terjadi pada Selasa, 30 November 2018 lalu. Pada upacara bendera memperingati Hari Oeang RI Ke-72 dan Hari Sumpah Pemuda, Winardi dinobatkan sebagai pegawai teladan di lingkungan DJPb. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan itu diberikan padanya bersama perwakilan dari eselon I lainnya yang juga dinilai mampu menjadi contoh bagi pegawai lainnya dalam memberikan kinerja terbaik bagi Kementerian Keuangan.

"Jujur saya tidak percaya mendapatkan penghargaan ini. Saya merasa hanya menjalankan tugas, sama seperti pegawai lainnya" ucap

Winardi. Baginya, seluruh pegawai juga memiliki kesempatan yang sama memperoleh gelar yang disandangnya. Gelar tersebut dianggap Winardi memang sangat prestisius dan turut membuat bangga keluarga, rekan, atasan, dan pimpinannya. "Suatu kehormatan menerima penghargaan langsung dari Bu Menteri dan Pak Dirjen Perbendaharaan. Oleh karena itu, bagi saya ini adalah titik tolak balik berikutnya untuk selalu berusaha menjadi pantas dan layak menyandang predikat tersebut," ungkapnya.

Berangkat dari niat

"Niat adalah kunci dari segalanya," ungkap Bapak satu anak ini saat ditanya apa rahasia dari semangatnya bekerja. "Menuju tempat kerja saya niatkan agar rezeki dari pekerjaan saya itu berkah untuk saya dan keluarga," lanjutnya.

Selain niat, Winardi menganggap rasa malu turut serta membuatnya untuk selalu berusaha lebih baik lagi. Rasa malu disini bukan perasaan minder dalam pekerjaan yang dilakukan. Namun, hal itu lebih menjadi sebuah pengingat baginya untuk terus berbenah. "Saya malu jika sebagai pegawai tidak bisa menjalankan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya," jelasnya. "Penghasilan yang saya dapat terlalu

'wah' jika hanya sekedar datang ke tempat kerja. Malu rasanya sama saudara kita yang masih harus berjuang mendapatkan pekerjaan!" lanjutnya.

Seimbangkan peran

Selain menjadi abdi negara, Winardi terus berusaha seimbangkan perannya sebagai kepala rumah tangga bagi keluarganya. Di akhir pekan dirinya tetap meluangkan waktu untuk keluarga. "Kadang wisata kuliner atau sesekali menemani anak bermain di *game zone*," terangnya. Nampaknya olah raga merupakan salah satu aktivitas favoritnya. Di kantor pun ia gemar main voli dengan rekan sejawatnya.

Bagi Winardi menjaga hubungan penting dalam menjaga keseimbangan peran yang ia jalani. "Teman sejawat adalah saudara di tempat kerja, sedangkan atasan merupakan mitra selayaknya simbiosis mutualisme sehingga butuh komunikasi positif" jelasnya. Sebagai penutup, Win berpesan mengenai pentingnya bekerja dengan ikhlas. "Jika bekerja secara ikhlas maka akan tercipta suatu energi yang positif. Banyak hal baik yang dapat kita capai jika apa yang kita lakukan didasari energi positif tersebut."

Teks Dimach Putra

Winardi saat menjadi Duta Transformasi

Foto Dok. Pribadi



Menjemput Hoki



Apakah Anda percaya bahwa manusia membuat nasib baik dan buruknya sendiri? Atau apakah Anda percaya bahwa ada manusia yang memiliki keberuntungan bagus (*good fortune*), sedangkan yang lain seringkali memiliki nasib sial?

Seorang kawan dipanggil dengan sebutan 'si bos' lantaran ia terkenal memiliki tingkat hoki yang tinggi. Ia menyaksikan Piala Dunia 2014 di Brazil, menonton konser Rihanna di Paris, dan menjelajah berbagai negara di dunia secara cuma-cuma. Belum lagi, berbagai hadiah seperti laptop dan ponsel pintar spek tertinggi berhasil ia dapatkan. Semua ia peroleh dari memenangkan kuis demi kuis yang diselenggarakan di media sosial. Contoh dari betapa beruntungnya ia adalah saat ponsel terbarunya didapatkan hanya dengan meninggalkan komentar di sebuah foto produk tertentu. komentarnya menjadi satu yang terpilih dari sepuluh ribu komentar yang ada.

Bagaimana ia bisa selalu hoki? Saya menanyakan apa amalan rahasianya. Dia pun tertawa.

Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa keberuntungan terkait dengan hal-hal di luar kuasa manusia atau ada orang-orang yang dilahirkan untuk menjadi 'beruntung'. Namun, sebuah riset ilmiah selama sepuluh tahun yang dilakukan oleh Richard J. Wiseman, seorang profesor di bidang psikologi pada Universitas Hertfordshire menunjukkan bahwa orang menciptakan keberuntungan atau ketidakberuntungannya sendiri. Kabar menggembirakannya adalah manusia bisa meningkatkan tingkat kekokian dalam hidupnya.

Bagaimana?

Riset yang dilakukan oleh Profesor Wiseman lebih lanjut

menunjukkan, bahwa orang-orang beruntung menghasilkan keberuntungan mereka sendiri melalui empat prinsip dasar. Pertama, orang-orang beruntung cenderung pandai menyadari adanya kesempatan dan mampu memaksimalkannya. Orang beruntung cenderung lebih relaks dalam menjalani hidup dan terbuka terhadap pengalaman baru.

Kedua, orang-orang beruntung menciptakan keputusan yang mendatangkan keberuntungan dengan mendengarkan intuisi dan mengikuti firasat mereka. Hal-hal yang bisa meningkatkan intuisi, seperti refleksi diri dan meditasi.

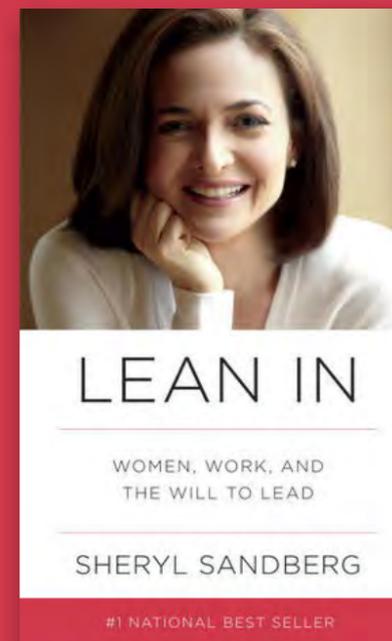
Ketiga, orang-orang beruntung memiliki ekspektasi positif. Mereka yakin masa depan mereka dipenuhi keberuntungan. Untuk itu, mereka melakukan upaya terbaik untuk mewujudkan keinginan tersebut dan berinteraksi positif dengan orang lain.

Keempat, orang-orang beruntung mampu mengubah ketidakberuntungan jadi keberuntungan. Saat terjadi hal buruk, orang-orang beruntung mensyukuri bahwa hal yang lebih buruk tidak terjadi. Akibatnya, merasa lebih baik tentang diri dan hidup mereka. Hal ini menjaga ekspektasi positif mereka akan keberuntungan selanjutnya di masa yang akan datang.

Profesor Wiseman menyimpulkan bahwa banyak dari keberuntungan atau ketidakberuntungan yang kita alami merupakan hasil dari pikiran dan sikap kita. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Louis Pasteur, seorang ilmuwan terkemuka Prancis, "*Fortune favours the prepared mind.*"

Jadi, sudah siapkah kita menjemput hoki?

Teks Monika Yulando Putri



Lean In: Sentilan dalam Memperjuangkan Kesetaraan

Women empowerment. Satu hal yang melekat erat dengan sosok Sheryl Sandberg yang namanya semakin besar dengan karya *Lean in* yg terbit di tahun 2013 tersebut. Sheryl berhasil membuat sebuah statement luar biasa melalui bukunya tersebut. Buku ini bukan semata-mata tentang keberanian yang harus dimiliki wanita, namun membawa para pembaca lebih jauh kepada bagaimana cara membangun pola pikir untuk sejatinya mewujudkan *gender equality*. Dimana yang dia percaya, *gender equality* yang telah dicapai saat ini hanyalah awalan, dan sama sekali belum menyentuh akar permasalahan apalagi sampai kepada solusinya.

Satu bagian kritikal yang sangat menarik dari buku ini terletak pada bagian "*Introduction*", dimana ide yang menjadi buah pemikiran Sheryl dalam

karyanya ada pada pengalamannya di tempat parkir. Hal ini yang membuat buku ini menjadi begitu realistis. Terlepas dari latar belakang karir Sheryl yang membuat buku ini istimewa, namun kejadian demi kejadian yang diangkat dalam buku ini sebagian besar adalah kejadian-kejadian kecil di kehidupan sehari-hari yang sangat mungkin dialami oleh banyak wanita di belahan dunia lain.

Kesadaran Sheryl bahwa kesetaraan gender tidak bisa diperjuangkan oleh dirinya seorang diri membuat semangat dalam buku ini begitu nyata. Dari pemilihan kata dan bagaimana kalimat demi kalimat dirangkai, Sheryl berhasil mempertahankan idealismenya dalam membuat buku ini mudah dipahami dan menyenangkan untuk dibaca, tanpa meringankan substansinya. Buku ini berhasil membuat topik, yang bisa dikatakan jauh dari kata "ringan" ini menarik dan sangat mudah dipahami. Jujur dan sederhana. Dua hal tersebut

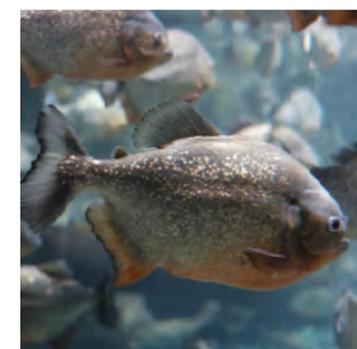
yang akan terngiang langsung sesaat setelah selesai membaca buku ini. Satu hal yang perlu apresiasi khusus adalah bagaimana Sheryl, yang sangat mungkin didaulat sebagai *alpha female*, dengan karir cemerlang, pemikiran brilian, dan kuasa kepemimpinan yang dimilikinya pada salah satu perusahaan raksasa di negara Adi Kuasa, mampu memposisikan dirinya pada sudut pandang wanita 'biasa' yang masih kerap sulit menyeimbangkan antara perasaan dan logika. Sheryl berhasil menggambarkan bagaimana *gender equality* tidak membuat dia berusaha untuk melepaskan kodratnya sebagai wanita.

Buku ini lebih dari sekedar motivasi. Buku ini menyentil sudut kecil di labirin otak kita, terutama untuk para wanita dengan segala perjuangannya, meninggalkan pertanyaan di ruang kecil hati kita, mengapa kita masih diam?

Peresensi: Penny Febriana

Jakarta Aquarium: Melaut di Daratan

Saat akhir pekan tiba, otakpun mulai diputar mencari destinasi pereda penat. Melihat alam bawah laut dipercaya bisa menjadi penghibur bagi jiwa yang telah kuyu. Alhamdulillah, kini tak perlu mabuk lautan dan menyelam hingga kedalaman. Di antara gedung menjulang ibu kota, terdapat pesona alam bawah laut Indonesia yang tersuguhkan. Inilah dia Jakarta Aquarium.



Terletak di lantai dasar, Neo Soho di Jakarta Barat, kita tak akan tersesat mencari lokasinya. Berkunjung ke sini saat akhir pekan, saya harus merogoh kocek sebesar Rp350.000. Biaya tersebut untuk membeli tiket reguler saya dan istri. Sedangkan anak saya yang masuk klasifikasi usia dua tahun ke bawah tidak bayar sepeserpun. Kalau ingin lebih hemat, cuti dan berkunjung pada hari kerja bisa jadi alternatif.

Mengusung konsep eskapisme urban yang menggabungkan kekayaan alam dan kebudayaan Indonesia dengan teknologi, Jakarta Aquarium menjanjikan pemandangan berbagai jenis satwa air dan darat yang merupakan satwa endemik Indonesia. Tempatnya terdiri dari dua lantai, tingkat atas dan tingkat bawah.

Di tingkat atas, pengunjung akan disambut suguhan interior yang cantik dan akuarium berisi ikan kecil berwarna-warni saat awal masuk. Beranjak maju, terdapat beragam-beragam yang sungguh menggemaskan. Mereka berlarian dan menyelam ke dalam air seakan tak peduli dikelilingi banyak pemerhati. Di lantai ini juga terdapat

beberapa hewan lagi seperti kura-kura, kepiting, ular, gurita, dan lainnya.

Sementara itu, di tingkat bawah, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan khazanah bawah laut Indonesia. Ada rombongan ubur-ubur yang melayang dengan warna bergantian akibat paparan lampu ke tubuhnya yang sejatinya transparan. Ada juga ikan hiu, pari, dan kerapu dalam ukuran raksasa. Terbersit dalam pikiran, jika ikan-ikan itu digoreng mungkin bisa untuk makan satu kelurahan.

Pengunjung bisa pula melihat sekawanan belut imut yang penampakannya seperti tanaman. Sayapun dibuat kagum dengan kotak kecil dalam sebuah akuarium yang di atasnya bertuliskan embrio salah satu jenis hiu. Di sana dipertontonkan fase perkembangan dari mulai telur hingga berumur 10 minggu. Luar biasanya, ternyata embrio yang dipajang bukan mainan, tapi benar-benar hidup dan bergerak. Asumsi saya mungkin ini teknologi semacam bayi tabung.

Pemandangan sedikit mengerikan saat ke kandang ikan piranha. Mereka bergerombol menggapung tanpa ada gerakan.

Padaahal, menurut video yang ditayangkan, mereka bisa menghabiskan mangsanya dalam waktu kurang dari 60 detik. Sungguh pembunuh berdarah dingin.

Jangan lewatkan juga area kolam sentuh. Di sini pengunjung dapat menyentuh ikan pari bintang biru, hiu bambu, bintang laut, teripang dan hewan lainnya dengan tangan telanjang. Di samping itu, pengunjung juga dapat menyaksikan tingkah lucu pinguin humboldt dari restoran Pingoo yang ada di dalam area.

Sebenarnya masih banyak lagi kekayaan alam bawah laut Indonesia yang tak cukup diceritakan di sini. Kabar baiknya, informasi seluruh satwa yang ada di Jakarta Aquarium dapat dibaca di layar sentuh yang tersedia. Segalanya serba digital dan lengkap dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Kalau malas membaca, pengunjung bisa bertanya langsung kepada petugas yang banyak tersebar di dalam area. Tunggu apalagi, segera kemasi barang bawaan dan bergegas ke sana.

Berbagai macam satwa laut di Jakarta Aquarium

Foto Dianita S.

Teks Eko Pandu Pranoto

Nitia Anisa

Tips Membaca Ala Nitia



Nitia Anisa

Foto
Resha Aditya P

Berasal dari kegemaran sang opung (kakek) membaca berbagai macam buku, Nitia Anisa pun jatuh cinta untuk membaca ragam jenis buku. Kegemaran itu turut membentuk karakter dirinya yang berwawasan luas. Selaras dengan hobinya, ia pun meniti karier menjadi presenter di Kompas TV.

Saat ini, Nitia berpendapat zaman telah banyak mengalami perubahan. Untuk itu, setiap orang perlu menyiapkan diri dalam transisinya saat ini. Sebagai contoh, dulu ia suka membeli buku yang sama hingga tiga buah. Tujuannya, yang satu untuk dibaca di rumah, satu lagi dibawa keluar rumah, dan satu lagi untuk dipotong-potong dan disimpan sebagai *klipping* kenangan. Namun saat ini dengan keberadaan gawai dan internet, orang sudah mulai membaca e-book dan sejenisnya. Namun demikian, Nitia berharap agar nilai pembelajaran yang diperoleh tetap sama karena itulah yang lebih penting.

"Mudah-mudahan sih mereka juga mendapat kesan yang sama ya. Jadi, lembaran-lembaran ini tuh *nggak* akan tergantikan dengan *swipe* kanan atau kirinya *gadget*, meskipun itu *nggak* bisa terpisahkan gitu ya," ujarnya selepas menjadi pembawa acara dalam Festival Literasi Kementerian Keuangan 2018 bersama Rhenald Kasali beberapa waktu lalu.

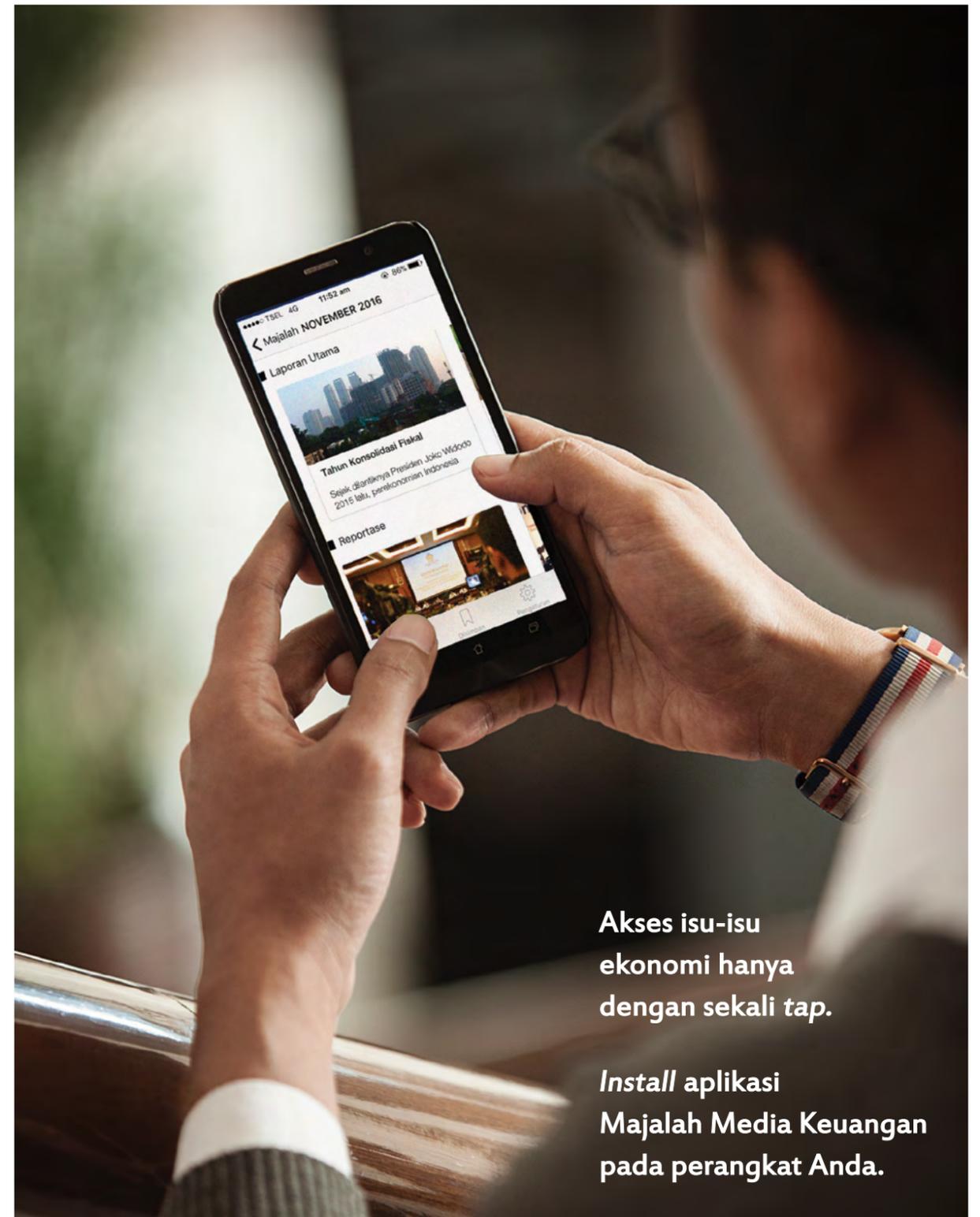
Nitia membutuhkan tiga hari untuk menamatkan buku yang akan dibedah sendiri oleh sang penulis, Rhenald Kasali. Buku yang terdiri lebih dari 500 halaman tersebut

habis dibacanya selama kurang lebih tiga hari. Menjadi kewajiban bagi seorang moderator ketika membawakan acara bedah buku untuk mengetahui isi dari buku yang akan dibedah.

Untuk menyiasati buku yang tebal, Nitia mempunyai tips tersendiri. "Kalau buku Prof Rhenald itu kan ada tiga bagian, terus saya lihat rata-rata satu bagian itu ada sekitar enam bab, nah jadi saya bagi saja. Kalau sebelum sarapan atau sambil saya sarapan, saya baca dua bab. Pas lagi makan siang saya baca dua bab lagi. Jadi satu hari itu saya bisa bacanya satu bagian. Dan kalau misalnya sudah satu bagian, biasanya sudah ada rasa senang tuh, wah berhasil nih. Satu bagian berhasil dalam satu hari, ok besok lagi, gitu."

Untuk buku-buku fiksi biasanya memang mudah untuk dibaca dan selalu ingin mengetahui akhir ceritanya. Namun berbeda bila membaca buku yang sifatnya pengetahuan. "Kalau buku-buku yang sifatnya pengetahuan kan kadang-kadang suka bosan banget ya, *nggak* ngerti deh kata-katanya terlalu ilmiah buat kita. Kalau trik saya sih biasanya saya ukur kemampuan saya. Saya tahu kira-kira saya punya waktu *tuh* di jam segini, jam segini, jam segini, gitu. Karena biasanya saya selalu baca buku pas sambil makan, jadi itu bisa sambil menghemat waktu atau misalnya kalau lagi di KRL (Kereta Rel Listrik), itu saya sambil baca buku. Mudah-mudahan sih bisa dipraktekkan ya, lumayan ampuh loh," ujarnya sambil tersenyum.

Teks Abdul Aziz



Akses isu-isu ekonomi hanya dengan sekali *tap*.

Install aplikasi Majalah Media Keuangan pada perangkat Anda.



@majalahmediakeuangan



MEMPERINGATI HARI AIDS SEDUNIA
1 DESEMBER 2018

Foto
Anas Nur Huda



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA